



Larangan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KOTA DENPASAR ATAS DATA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.



Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 ini bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 27 Maret 2026



Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik
oleh:

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



ບົດທິສຸງກະຊວງພະລາຊະບາດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ທຸງກະຊວງພະລາຊະບາດ ພະລາຊະບາດ
INSPEKTORAT DAERAH

ທາງຕາມ ບົດທິສຸງກະຊວງພະລາຊະບາດ ພະລາຊະບາດ (ໂທລະສັບ) ພະລາຊະບາດ
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar selaku penyusun laporan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini .

Denpasar, 27 Maret 2026

Inspektur Daerah Kota Denpasar,



Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE,MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711205 199603 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN REVIU	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG.....	10
B. DASAR HUKUM	11
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR.....	12
1. Kondisi Geografis	12
2. Kondisi Demografis.....	13
3. Pertumbuhan Ekonomi	16
D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI....	17
1. Kewenangan.....	17
2. Tugas Pokok.....	18
3. Struktur Organisasi.....	18
E. Aparatur Pemerintah	19
1. Berdasarkan Eselonisasi	19
2. Berdasarkan Pendidikan	20
3. Berdasarkan Jenis Jabatan	20
4. Berdasarkan Golongan	20
F. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	21
1. BAB I PENDAHULUAN.....	21
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
4. BAB IV PENUTUP	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
C. Formula Perhitungan Capaian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	32
B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	34
C. Akuntabilitas Keuangan	107
D. Analisa Efisiensi.....	109
BAB IV PENUTUP	113
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Statistik Kependudukan, 2023-2025	14
Tabel 1.2	Perbandingan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk per km dan rasio jenis kelamin di wilayah kab/kota se Bali tahun 2025	15
Tabel 1.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2022-2025	15
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Year on Year Tahun 2025.....	16
Tabel 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023- 2025	16
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	24
Tabel 2.2	Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025.....	27
Tabel 2.4	Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	29
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2025	32
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	35
Tabel 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2022-2025)	37
Tabel 3.5	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2022-2025)	38
Tabel 3.6	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2023-2025).....	40
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	43
Tabel 3.8	Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2022 – 2025 menurut Kabupaten/Kota.....	44
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	48
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Mengentaskan Kemiskinan.....	51

Tabel 3.11	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota se Provinsi Bali Tahun 2025	52
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	54
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Kasus Kriminalitas	60
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Ketahanan Pangan.....	62
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	66
Tabel 3.16.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	69
Tabel 3.17.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas	72
Tabel 3.18.	Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2025.....	74
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Mengurangi Pengangguran	75
Tabel 3.20.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	79
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Inovasi Daerah.....	84
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	87
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	91
Tabel 3.24	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan.....	103
Tabel 3.25	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2025	107
Tabel 3.26	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar	108
Tabel 3.27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2024.....	13
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	19
Gambar 3.1	Grafik Capaian Kinerja	34
Gambar 3.2	Indeks Risiko Bencana Denpasar Tahun 2021-2025	66

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dan akhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 16 Sasaran dan 17 Indikator Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- **Misi 1. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- **Misi 2. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target), 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target) yang masih memakai nilai tahun 2024 dikarenakan data 2025 belum rilis dari BPS.

- **Misi 3. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- **Misi 4. terdapat 2 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target).
- **Misi 5. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja :**
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 17 indikator sasaran, diketahui bahwa 10 indikator atau 59% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 6 indikator atau 35% kategori Baik, 1 indikator atau 6% kategori Baik namun masih memakai data tahun 2024. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 termasuk dalam Kategori “Baik Sekali”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Atas Data Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025, serta hasil reviu sasaran dan indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LKjIP Atas Data Tahun 2025 menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar adalah :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi titik pusat kegiatan dan penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar. Sebagai Ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

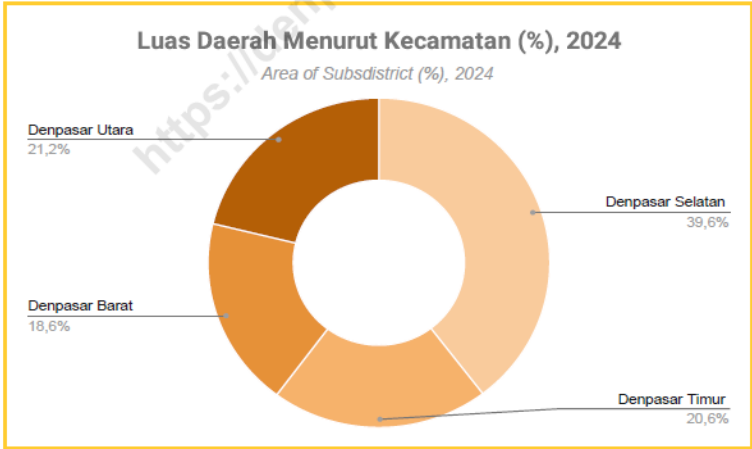
- Sebelah utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- Sebelah timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- Sebelah selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
- Sebelah barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)



Secara geografis Kota Denpasar terletak di antara 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur dengan luas wilayah 125,98 km² (2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali) yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan

Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,89 km² (40% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 26,69 km² (21%), dan Denpasar Timur dengan luas wilayah sebesar 25,93 km² (20%). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 23,46 km² (19%). Jadi total luas wilayah Kota Denpasar yakni 125,97 km². Selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2024



Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka 2025

2. Kondisi Demografis

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembangunan dibidang kependudukan bukanlah hal yang mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Beban tersebut diantaranya pengangguran yang tinggi, kriminalitas meningkat dan perekonomian yang buruk. Selain kualitas penduduknya, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

Dari segi jumlah, penduduk Denpasar cukup banyak dibandingkan jumlah total penduduk Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 762.484 orang di tahun 2025, angka ini hampir mencapai 17,09% dari jumlah penduduk Bali tahun 2025 yang berjumlah sekitar 4.461.270 orang (Proyeksi BPS- Provinsi Bali dalam angka 2021-2026).

Tabel 1.1 Statistik Kependudukan, 2023-2025

Uraian	2023	2024	2025
Jumlah penduduk (jiwa)	748.397	755.570	762.484
Pertumbuhan penduduk (persen)	1,00	0,96	0,92
Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	5.940,60	5.997,54	6.052,42
Rasio jenis kelamin	102,09	102,09	102,07
Rasio beban tanggungan	37,84	37,96	38,23

Sumber: BPS Kota Denpasar (Kota Denpasar dalam angka 2025-Data diolah)

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada Tahun 2025 menurut data BPS mencapai 762.484 jiwa. Dimana laki-laki berjumlah 385.152 dan perempuan berjumlah 377.332 (sumber proyeksi BPS 2021-2026). Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/sex ratio (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Denpasar relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Selama kurun waktu 2023-2025, sex ratio penduduk Denpasar berada pada kisaran kurang lebih 102. Dan pada Tahun 2025 di angka 102,07. Jika dilihat dari rasio jenis kelamin, setiap 100 penduduk Perempuan di Kota Denpasar terdapat 102 penduduk laki-laki.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Denpasar mengalami kenaikan dari tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 1,03 lebih tinggi dari capaian provinsi 0,69. Secara rinci grafik trend laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3 Tabel Perbandingan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk per km persegi dan rasio jenis kelamin di wilayah kab/kota se Bali Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Jembrana	327,7	0,70	7,35	387	100,3
Tabanan	469,1	0,34	10,52	553	98,8
Badung	573,7	0,96	12,86	1.444	100,5
Gianyar	530,1	0,60	11,88	1.457	98,7
Klungkung	209,9	0,30	4,70	672	100,7
Bangli	263,2	0,36	5,90	500	101,1
Karang Asem	504,6	0,52	11,31	602	99,8
Buleleng	820,5	0,75	18,39	621	100,7
Kota Denpasar	762,5	1,06	17,09	6.066	102,1
Bali	4.461,3	0,69	100,00	799	100,4

Sumber : BPS data diolah 2025

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk relatif lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Gambaran piramida penduduk Denpasar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Denpasar lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2015 dan 2022, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing masing kelompok umurnya.

Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Denpasar tergolong kota yang sangat padat di Provinsi Bali.

Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2022-2025

Uraian	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
2022	726,8	5.774
2023	748,4	5.247
2024	755,57	5.344
2025	762,50	6.066

Sumber : Proyeksi BPS Kota Denpasar, 2025

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Denpasar merupakan yang terbesar di Bali karena menjadi pusat pemerintahan dan Ibu Kota Provinsi Bali. Pada Tahun 2025 (Desember) Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 3,45 persen per Desember 2025 yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 107,87 pada Januari 2025 dan menjadi 111,89 pada Desember 2025. Sementara itu, tingkat Inflasi tahunan Kota Denpasar Tahun 2024 yakni 2,69 persen. Kenaikan inflasi diakibatkan dengan peningkatan indeks harga konsumen.

Tabel 1.3 Tingkat Inflasi Year on Year Tahun 2025

Wilayah Inflasi DPS- Bali- Nasional	Inflasi y-o-y (year on year) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional (Persen)								
	2025								
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kota Denpasar	2,69	2,48	3,30	3,51	3,05	3,42	3,29	3,26	3,45
Provinsi Bali	2,30	1,92	2,94	3,16	2,65	2,51	2,61	2,51	2,91
Nasional	1,95	1,60	1,87	2,37	2,31	2,65	2,86	2,72	2,92

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2025

Dilihat dari tabel diatas, inflasi Kota Denpasar Tahun 2025 yakni 3,45 persen melebihi Tingkat inflasi provinsi dan nasional. Tingginya Inflasi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor. Tim Pengendalian Inflasi Kota Denpasar terus mengupayakan untuk menurunkan Tingkat inflasi yang terjadi di Kota Denpasar.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023-2024 dan 2025

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)	
	2023	2024
Kab. Jembrana	3,66	4,98
Kab. Tabanan	3,56	4,94
Kab. Badung	11,29	5,94
Kab. Gianyar	5,06	5,47
Kab. Klungkung	4,70	5,08
Kab. Bangli	3,50	4,54
Kab. Karangasem	3,10	4,33
Kab. Buleleng	3,64	5,04
Kota Denpasar	5,69	5,55
Provinsi Bali	5,71	5,48

Sumber : BPS Kota Denpasar 2024

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)	
	2025	
Kab. Jembrana		5,26
Kab. Tabanan		5,45
Kab. Badung		6,26
Kab. Gianyar		5,89
Kab. Klungkung		5,67
Kab. Bangli		5,31
Kab. Karangasem		5,25
Kab. Buleleng		5,54
Kota Denpasar		6,11
Provinsi Bali		5,82

Sumber : BPS Kota Denpasar 2025

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan PDRB/ekonomi Kota Denpasar sebesar -0,92 persen. Hal tersebut disebabkan akibat pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,02 persen dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 5,69 persen, namun pada tahun 2024 pertumbuhan perekonomian turun menjadi 5,55 dan Pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar menjadi 6,11 Persen.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kewenangan

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 6 (enam) urusan dasar dalam menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ;

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- 1) Tenaga kerja
- 2) Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Perindustrian.

2. Tugas Pokok

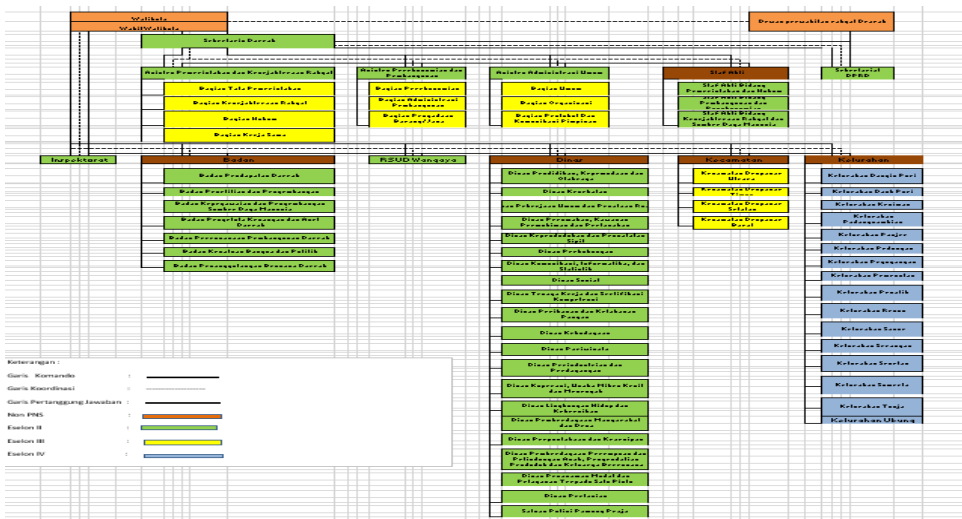
Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

3. Struktur Organisasi

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah. Maka struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

Dalam Perkembangannya, Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2023 telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar telah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan terdapat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar yang dipisah tugas pokok dan fungsinya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

E. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat per Desember Tahun 2025 sebanyak 10.666 orang, terdiri dari :

1. Berdasarkan Eselonisasi

NO	ESELON	JUMLAH
1	II.a	1
2	II.b	45
3	III.a	113
4	III.b	137
5	IV.a	96
6	IV.b	36
7	Non Eselon	10.238
JUMLAH		10.666

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2025

2. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	106
2	SMP	2186
3	SMA	223
4	D.I	3
5	D.II	14
6	D.III	680
7	D.IV	117
8	S1	6706
9	S2	620
10	S3	11
TOTAL		10.666

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2025

3. Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Fungsional	1641
2	Guru	3224
3	Pelaksana	5373
4	Struktural	428
JUMLAH		10.666

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2025

4. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	68
2	II	326
3	III	2886
4	IV	694
5	IX	4396
6	VII	1708
7	X	386
8	XI	182
JUMLAH		10.666

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, 2025

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Atas Data Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, kewenangan, tugas pokok serta struktur Organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis, rencana kerja, pengukuran kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada BAB ini menguraikan tentang Realisasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan secara umum atas capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar serta Langkah – Langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Pada Tahun 2025, merupakan Tahun peralihan dari Akhir Periode RPJMD ke perubahan RPJMD yang baru sesuai dengan penetapan Kepala Daerah.

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 :

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (sustainable), Purradhipa Bhara Bhawana yang diartikan

Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju.

Makna Krama (manusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar. Adapun sains tekno-ekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.

Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi inti dan titik tumpu perkembangan masyarakat.

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan 6 (enam) tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3		4	
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup (Tahun)
		3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita
		4	Mengurangi Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan (%)
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA	5	Persentase penegakan PERDA (%)
		6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)
		7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan
		8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Risiko Bencana
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM (%)
		10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP
				11	Opini BPK
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	11	Mengurangi Pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		13 Meningkatkan Inovasi Daerah	14 Predikat inovasi daerah
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	14 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	15 Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar (%)
		15 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	16 Indeks Kualitas Hidup
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	16 Meningkatkan pembangunan kebudayaan	17 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar, 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.678.158.827.573,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.372.326.767.686,50 Secara detail anggaran kinerja Pemerintah Kota Denpasar untuk masing-masing Tujuan/Sasaran disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	485.216.848.350,00
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	32.759.092.727,00
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik	109.437.539.190,00
4	Meningkatkan Daya Saing Daerah	9.720.486.700,00
5	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana	968.890.698.506,00
6	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	72.134.162.100,00
TOTAL ANGGARAN		1.678.158.827.573,00

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2025 (data diolah)

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana.

Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan

adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target kinerja. Target kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan targetnya.

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2025 untuk 16 sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari 17 indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,783
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,84
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.703.535
4	Mengurangi kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	1,97
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	5	Persentase penegakan PERDA	Persen	93,85
6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Angka	105,43
7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	96

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	90,10
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM	Persen	91,79
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (78,35)
		11	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,10
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE	Indeks	4,00
13	Meningkatnya inovasi daerah	14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	63,35
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,04
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	74,84

Sumber : Penetapan Kinerja Walikota Denpasar Tahun 2025

C. Formula Perhitungan Capaian Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran pencapaian ke-17 (tujuh belas) IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, maka disusun formula perhitungan IKU dan sumber data, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Formula Perhitungan dan Sumber Data Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Indeks Pendidikan	Data Hasil Pemetaan/Survey	Hasil pemetaan/survey Badan Pusat Statistik
2	Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Hasil penghitungan / survey Badan Pusat Statistik
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Data Hasil Pemetaan/Survey BPS	Hasil penghitungan / survey BPS
4	Angka Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Banyaknya Orang Miskin}}{\text{Total Penduduk Denpasar}} \times 100\%$	Hasil penghitungan / survey Badan Pusat Statistik
5	Persentase penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100\%$	Hasil penghitungan / survey Dinas Satpol PP
6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Pusat Statistik	Hasil penghitungan / survey BPS
7	Indeks Ketahanan Pangan	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Ketahanan Pangan	Hasil penghitungan / survey Badan Ketahanan Pangan Nasional
8	Indeks Risiko Bencana	Data Hasil Pemetaan/Survey Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Hasil penghitungan / survey BNPB
9	Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total SKM PD/UPP}}{\text{Total PD/UPP}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
10	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori)	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN RB	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN RB
11	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Data Hasil Pemetaan/Survey BPS	Hasil pemetaan/survey BPS
13	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi dari Kementrian PAN RB	Hasil Evaluasi dari Kementrian PAN RB
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Hasil Evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Indeks Kualitas Air} + \text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}}{3}$	Hasil penghitungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Hasil pemetaan/ (kompilasi) dari Bappeda	Hasil pemetaan/ (kompilasi) Bappeda

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 16 (enam belas) sasaran.

Formula penghitungan terhadap IKU Kota Denpasar sebagian merupakan formula yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar. Sebagian IKU mengadopsi formula pengukuran yang sudah dilaksanakan secara nasional, baik yang dipublikasikan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) maupun kementerian. Selain itu, sumber data untuk mendapatkan capaian juga berasal dari capaian yang memang hasil penghitungan dari perangkat daerah teknis maupun yang terpublikasi secara resmi dari BPS dan Kementerian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 102,703% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024		CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN									
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.78	0.777	0.783	0.781	99.744	0.79	98.860
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :				99.744				
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN									
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.65	75.8	75.84	76.16	100.421	76.04	100.157
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :				100.421				
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT									
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2,562,828	2,621,604	2,703,535	2,647,971	97.944	2,844,242	93.099
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :				97.944				
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN									
4	Angka Kemiskinan	Persen	1.99	2.59	1.97	2.16	99.903	1.95	99.892
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :				99.903				
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA									
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	89.84	93.84	93.85	94.59	100.788	90.84	104.128
	Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :				100.788				
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS									
6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105.53	450.8	105.43	292.23	98.228	105.33	98.225
	Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :				98.228				
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN									
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	94	96.37	96	83.79	87.281	94.6	88.572
	Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :				87.281				
SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA									
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	95.76	90.18	90.1	103.31	99.853	90.1	99.853
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :				99.853				

SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK									
9	Rata-Rata SKM	Persen	91.91	91.78	91.79	92.29	100.544	89.66	102.933
	Rata-rata Capaian Kinerja 9 :				100.544				
SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI									
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB (77,50)	BB (76,92)	BB (78,35)	BB (76,98)	98.251	A (80)	96.225
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :				99.125				
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN									
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.8	2.11	2.1	1.41	100.328	6.62	100.787
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :				100.328				
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI									
13	Indeks SPBE	Indeks	3.85	3.96	4	4.28	107	3.9	109.743
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :				107				
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH									
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (71,17)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (81,70)	100	Sangat Inovatif	100
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :				100				
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR									
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	72.54	74.73	63.35	86.14	135.974	64.86	132.809
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :				135.974				
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.99	61.14	62.04	69.33	111.750	62.13	111.588
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :				111.750				
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN									
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	68.54	70.01	74.84	80.78	107.936	74.84	107.936
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :				107.936				

Sumber : LKjIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025

Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 menggunakan skala seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas.

Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja



Dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, diketahui 10 indikator atau 59% kategori Baik Sekali dan melampaui target, 6 indikator atau 35% kategori Baik, 1 indikator atau 6% kategori Baik namun masih memakai data tahun 2024. Rata-rata realisasi capaian kinerja Tahun 2025 mencapai **102,703%** atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 termasuk dalam Kategori “Baik Sekali”. Terdapat 1 (satu) IKU yang masih menggunakan data capaian Tahun 2024, yaitu penilaian Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana dimana sampai dengan pelaporan LKjIP Tahun 2025 ini disusun, hasil penilaian belum dirilis oleh BPS.

B. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut.

TUJUAN 1. MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR

Untuk mewujudkan Tujuan Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar, pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat

d. Mengurangi kemiskinan

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” yang telah ditetapkan. Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul. Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) **Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN										
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.78	0.777	99.615	0.783	0.781	99.744	0.79	98.860
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					99.744					

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu Indeks Pendidikan. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan di suatu Daerah, diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dihasilkan melalui pendidikan yang unggul dan bermutu. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia.

Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN								
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,779	0,780	0,783	0,776	0,777	0,781

Dari Tabel diatas, merupakan beberapa target Indeks Pendidikan beberapa Tahun kebelakang serta realisasinya. Realisasi pada tahun 2023, 2024, dan 2025 hasil realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN					
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.781	0.79	98.86075949

Dari Tabel diatas, tingkat kemajuan realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD adalah 98,86%. Indeks Pendidikan Kota Denpasar sejalan dengan IKU dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Knerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	Persentase Capaian Provinsi 7=4/5*100	Persentase Capaian Nasional 8=4/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	11.64	9.75	9.07	119.38	128.34
		Harapan Lama Sekolah	14.14	13.63	13.30	103.74	106.32
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Meningkatkan prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga	367	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar 2025 dan <https://denpasarkota.bps.go.id>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	11.69	11.53	98.63	11.78	11.64	98.81
		Harapan Lama Sekolah	14.11	14.13	100.14	14.13	14.14	100.07
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	92	100	108.70	100	100	100
3	Meningkatkan prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Event Olahraga	230	308	133.91	240	367	152.92

Tabel 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2022-2024) dan Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	8,64	8,65	8,70
Kab. Tabanan	9,15	9,35	9,57
Kab. Badung	10,64	10,90	11,14
Kab. Gianyar	9,55	9,80	9,84
Kab. Klungkung	8,46	8,48	8,74
Kab. Bangli	7,47	7,57	7,58
Kab. Karangasem	6,67	6,68	6,70
Kab. Buleleng	7,56	7,57	7,69
Kota Denpasar	11,50	11,52	11,53
Provinsi Bali	9,39	9,45	9,54

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
	2025	
Kab. Jembrana	8,71	
Kab. Tabanan	9,81	
Kab. Badung	11,26	
Kab. Gianyar	9,93	
Kab. Klungkung	8,75	
Kab. Bangli	7,80	
Kab. Karangasem	6,98	
Kab. Buleleng	7,94	
Kota Denpasar	11,64	
Provinsi Bali	9,75	

Sumber : BPS Bali 2025

Tabel 3.5 Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (2022-2024) dan Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	13,01	13,02	13,05
Kab. Tabanan	13,03	13,04	13,29
Kab. Badung	14,03	14,22	14,23
Kab. Gianyar	14,01	14,09	14,11
Kab. Klungkung	13,02	13,12	13,13
Kab. Bangli	12,49	12,52	12,53
Kab. Karangasem	12,62	12,63	12,91
Kab. Buleleng	13,26	13,27	13,30
Kota Denpasar	14,10	14,11	14,13
Provinsi Bali	13,48	13,58	13,62

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)	
	2025	
Kab. Jembrana		13,13
Kab. Tabanan		13,37
Kab. Badung		14,26
Kab. Gianyar		14,12
Kab. Klungkung		13,14
Kab. Bangli		12,54
Kab. Karangasem		12,92
Kab. Buleleng		13,31
Kota Denpasar		14,14
Provinsi Bali		13,63

Sumber : BPS 2025

- Rata-Rata Lama Sekolah Kota Denpasar pada tahun 2025 terealisasi sebesar 11.64 tahun dari target 11.78 tahun, sehingga capaiannya sebesar 98.81%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan Standar Provinsi Bali Tahun 2025 yang capaian Rata-Rata Lama Sekolahnya sebesar 9.75 tahun, maka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 1.89 tahun dengan persentase capaian sebesar 119.38% dan jika dibandingkan dengan Standar Nasional yang capaian Rata-Rata Lama Sekolahnya sebesar 9.07 tahun, maka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 2.57 tahun dengan persentase capaian sebesar 128.34%.
- Harapan Lama Sekolah Kota Denpasar pada tahun 2025 terealisasi sebesar 14.14 tahun dari target 14.13 tahun, sehingga capaiannya sebesar 100.07%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan Standar Provinsi Bali Tahun 2025 yang capaian Harapan Lama Sekolahnya

sebesar 13.63 tahun maka Harapan Lama Sekolah di Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 0.51 tahun dengan persentase capaian sebesar 103.74% dan jika dibandingkan dengan Standar Nasional yang capaian Harapan Lama Sekolahnya sebesar 13.30 tahun maka Harapan Lama Sekolah di Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 0.84 tahun dengan persentase capaian sebesar 106.32%.



(sumber : IPM Indonesia 2020-2025, Infografis BPS Nasional Tahun 2025,
<https://www.bps.go.id/id/infographic>)

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Bali
Tahun 2023-2024 dan 2025

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)	
	2023	2024
Kab. Jembrana	74,80	75,32
Kab. Tabanan	77,87	78,83
Kab. Badung	83,00	83,73
Kab. Gianyar	79,69	80,23
Kab. Klungkung	74,18	75,15
Kab. Bangli	71,99	72,51
Kab. Karangasem	70,09	70,91
Kab. Buleleng	74,87	75,35
Kota Denpasar	84,68	85,11
Provinsi Bali	78,01	78,63

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)	
	2025	
Kab. Jembrana		75,94
Kab. Tabanan		79,70
Kab. Badung		84,27
Kab. Gianyar		80,96
Kab. Klungkung		75,89
Kab. Bangli		73,22
Kab. Karangasem		71,89
Kab. Buleleng		76,06
Kota Denpasar		85,63
Provinsi Bali		79,37

Sumber: <https://bali.bps.go.id/id> (Tahun 2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar Tahun 2025 yakni **85,63** meningkat 0,52 dari Tahun 2024 sebesar 85,11 serta Tahun 2023 yakni dengan nilai 84,68 dengan IPM Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar 79,37. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Level Nasional Tahun 2025 dengan nilai 75,90. Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa IPM Kota Denpasar Tahun 2025 melebihi nilai IPM Provinsi Bali dan IPM Nasional.

Komponen untuk menghitung indeks pendidikan yaitu Indeks Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah. Indeks Pendidikan tidak tercapai karena Angka Rata-Rata Lama Sekolah tidak tercapai. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS Kota Denpasar

tahun 2025 yaitu 11,64 dapat diartikan penduduk Kota Denpasar yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata pernah menjalani pendidikan selama 11 tahun atau sampai dengan Pendidikan Menengah Atas (SMA). Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,11 dari tahun 2024. Capaian RLS Kota Denpasar lebih tinggi sebesar 1,89 dibandingkan RLS Provinsi Bali dan merupakan yang paling tertinggi di provinsi Bali. Jika dilihat dari kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang berwenang pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, maka kinerjanya sudah terpenuhi karena rata-rata penduduk Kota Denpasar selesai bersekolah di jenjang Pendidikan Menengah Atas yang sudah menjadi kewenangan Provinsi. Capaian tahun 2025 tidak mencapai target karena kenaikan dari 3 tahun terakhir tidak signifikan, sedangkan saat penentuan target kami menggunakan trend capaian tahun 2020 ke bawah dimana peningkatannya cukup signifikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat migrasi penduduk (jenjang pendidikan rendah) yang cukup tinggi ke Denpasar, untuk mencari pekerjaan karena Denpasar merupakan kota yang perputaran ekonominya cukup pesat. Dimana mereka juga digunakan sebagai sampel dalam perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah oleh BPS.

Adapun Analisis Ketidaktercapaian Indeks Pendidikan serta permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (masih kurangnya jumlah sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar)
- Masih adanya anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP
- Masih belum tercapainya rasio jumlah guru dengan siswa
- Masih kurangnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Adapun Solusi yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut:

- Melengkapi dan membangun sarana dan prasarana pendidikan guna mendekatkan akses Pendidikan bagi masyarakat
- Mencegah adanya anak putus sekolah dan mendorong masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, melaksanakan sosialisasi pentingnya Pendidikan kepada masyarakat;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru guna keberlanjutan proses dan peningkatan kualitas pendidikan;
- memaksimalkan program beasiswa dan bantuan sosial untuk anak-anak

yang kurang mampu agar bisa bersekolah formal dan mendukung program wajib belajar 12 tahun. Hal ini akan memberikan dampak jangka panjang untuk meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah, mengingat Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal.

Perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU Indeks Pendidikan, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
2. Memenuhi kebutuhan guru agar sesuai rasio jumlah siswa - Membangun sekolah baru sesuai kebutuhan jenjang pendidikan - Memaksimalkan kegiatan pendidikan kesetaraan (program kejar paket A/B/C).
3. Untuk meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah hal yang dilakukan yaitu memaksimalkan program beasiswa dan bantuan social untuk anak-anak yang kurang mampu agar bisa bersekolah formal dan mendukung program wajib belajar 12 tahun. Hal ini akan memberikan dampak jangka panjang untuk meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah, mengingat Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal.

Selain itu, kami juga mengembangkan beberapa aplikasi inovasi untuk menunjang proses pembelajaran dan pendataan tenaga pendidik, yaitu - Komunitas Sapulidi, SI SEKAT (Sistem Informasi Sekolah Sehat), MESADU (Melaporkan Efektif Secara Aman dan Menyeluruh), SILAMIS (Sistem Informasi LABU MANIS (Lenyapkan Aksi Bullying Mari Harmonis)), MEKEBER BERSAMA TRIPOD (Menumbuhkembangkan Keberanian Bersama Spentri Podcast), Aplikasi Halo Guru, Inovasi Jaya Gupta, Si Master Rindu (Sistem Informasi Terpadu Penerimaan Murid Baru), dan Inovasi SUASTIASTU (Sistem Anak Spesial, Terintegrasi Sigap Terpadu).

Terdapat beberapa penghargaan yang diperoleh Disdikpora di tahun 2025, antara lain:

1. Juara II KIPRAH Katagori Satuan Kerja Perangkat Daerah Terinovatif
2. Penghargaan sebagai Praktik Baik kategori cerita praktik baik pada Sayembara Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) 2025 untuk tingkat Pemerintah Kota.

3. Penghargaan Edukator Terbaik Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
4. Penghargaan Kejar Awaard Tahun 2025 kategori Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) terbaik tingkat kabupaten/kota.

2) **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Kualitas Pelayanan Kesehatan merupakan gambaran kemampuan/Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN										
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.65	75.8	100.198	75.84	76.16	100.421	76.04	100.157
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					100.421					

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada Tahun 2025 yaitu 76,16 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar dapat tercapai dari beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai yaitu:

- a. Sudah terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar
- b. Anggaran Kesehatan perkapita pertahun di Kota Denpasar sudah cukup tinggi
- c. Anggaran Kesehatan sudah lebih dari 10% dari total APBD Kota Denpasar sesuai amanat Undang-undang.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Denpasar berada diatas capaian angka harapan hidup Provinsi Bali dan Nasional. Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar pada Tahun 2025 mencapai 76,16 Tahun. (sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025).

Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 75,84 Tahun, dapat terealisasi sebesar 100,42% (Baik Sekali). Data harapan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.8 Data Umur Harapan Hidup Provinsi Bali
Tahun 2022 -2025 menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	72,82	73,20	73,51
Kab. Tabanan	74,10	74,48	74,80
Kab. Badung	75,51	75,88	76,18
Kab. Gianyar	74,13	74,52	74,86
Kab. Klungkung	71,83	72,28	72,50
Kab. Bangli	70,97	71,33	71,63
Kab. Karangasem	70,89	71,25	71,53
Kab. Buleleng	72,32	72,70	72,92
Kota Denpasar	75,30	75,69	76,01
Provinsi Bali	72,60	72,98	73,29

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Hasil Long Form SP2020 (Tahun)	
	2025	
Kab. Jembrana		75,42
Kab. Tabanan		76,07
Kab. Badung		76,18
Kab. Gianyar		76,14
Kab. Klungkung		75,32
Kab. Bangli		74,60
Kab. Karangasem		74,52
Kab. Buleleng		74,87
Kota Denpasar		76,16
Provinsi Bali		75,46



(sumber : IPM Indonesia 2020-2025, Infografis BPS Nasional Tahun 2025)

Umur Harapan Hidup Tingkat Nasional Tahun 2025 adalah 74,47 Tahun. Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa Umur Harapan Hidup Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali dan Tingkat Nasional pada Tahun 2025 yakni sebesar 76,16 Tahun. (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan BPS)

Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH juga bisa diartikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa. uHH merupakan salah satu indikator Kesehatan masyarakat. Besar kecilnya UHH suatu generasi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mampu melewati umur tertentu. Cara menghitung UHH secara ideal adalah dengan menggunakan Angka Kematian Menurut Umur (ASDR). Namun, di Indonesia, UHH dihitung dengan cara tidak langsung.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN								
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,46	75,65	75,84	75,59	75,80	76,16



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN							
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	76.16	75.46	74.47	100.927	102.269

Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka harapan hidup dari tahun 2022-2025 terus mengalami peningkatan secara signifikan

hal ini dimungkinkan karena meningkatnya status kesehatan masyarakat secara umum. Pada data diatas Angka Harapan Hidup Kota Denpasar lebih tinggi dari capaian Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2025. Hal tersebut didukung oleh tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan akses yang cukup merata di wilayah Kota Denpasar.

Adapun analisis Keberhasilan yakni sebagai berikut :

1. Ketersediaan fasilitas Kesehatan yang memadai
2. Sarana & prasarana faskes yang memadai
3. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai
4. Peran serta masyarakat yang sangat mendukung dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan
5. Adanya Dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang Kesehatan.

Program yang mendukung tercapainya IKU tahun 2025, terdapat 6 program antara lain, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pelaksanaan Program ini dimaksimalkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan sasaran ibu, bayi, balita. usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif, dan usia lanjut. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup.

Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan hasil nilai IKU antara lain: Inovasi LAGU BUNDA (Layanan Data Terintegrasi dan Terpadu Ibu-Bayi Denpasar), Inovasi GADAR SANTI : Gerakan Denpasar Damai dalam upaya percepatan, pencegahan dan penurunan AKI,AKB dan Stunting yang didukung dengan inovasi :Web SIRIA(Sistem Inormasi Ramah Ibu dan Anak, Inovasi GEMAR TERSYANTIK (Gerakan Jumat Minum Pil Pintar dan Santik), Inovasi GEKTRI NGEPING (Gerakan Pelayanan Triple Eliminasi dan Buku Ping), Inovasi POS PRANA JIWA (Pusat Pelayanan Terpadu Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Puskesmas III Denpasar Utara), Inovasi CETING DENGAN I-KEMBUNG (Cegah Stunting Dengan olahan Ikan Kembung di Puskesmas I Denpasar Utara), Inovasi GEMA CERMAT PLUS (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Plus Integrasi Layanan Primer Puskesmas dengan Posyandudi Puskesmas II Denpasar Utara) serta DAMAKESMAS (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat).

Terdapat beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025, antara lain:

1. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda kepada Kota Denpasar atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2025 Tingkat Nasional (Dinas Kesehatan Kota Denpasar)
2. Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai Peringkat I Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Implementasi SATUSEHAT Logistik SMILE untuk Program HIV/AIDS, TB, dan Malaria (ATM) Terbaik Tahun 2025 Tingkat Nasional (Dinas Kesehatan Kota Denpasar)
3. Penghargaan kepada Pemerintah Kota Denpasar atas inovasi TOBAT (TEMUKAN OBATI BERI DUKUNGAN AJAK BERSOSIALISASI TERIMA DI KELUARGA DAN MASYARAKAT) sebagai Finalis Top Inovasi KIPP Tahun 2025 Kelompok Umum Tingkat Nasional (Puskesmas III Denut)
4. Penghargaan kepada Kota Denpasar sebagai Kabupaten/Kota Terbaik II atas capaian kinerja Program Penanggulangan TBC di Provinsi Bali Tahun 2025 (Dinas Kesehatan Kota Denpasar)
5. Penghargaan sebagai Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Denpasar Tahun 2025 Kategori Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (Puskesmas II Densel)
6. Penghargaan sebagai Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Denpasar Tahun 2025 Kategori Dokter (Puskesmas III Densel)
7. Penghargaan sebagai Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Denpasar Tahun 2025 Kategori Apoteker (Puskesmas III Densel)
8. Penghargaan Akreditasi Paripurna RSUD Wangaya Tahun 2025 s/d 2029

3) Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT										
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2,562,828	2,621,604	102.293	2,703,535	2,647,971	97.944	2,844,242	93.099
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					97.944					

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja dari hasil realisasi Tahun 2025 terkait rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Denpasar yakni sebesar **97,944 %** dan capaian perbandingan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 93,09%. Adapun hasil analisis dapat dilihat dari gambar dan tabel dibawah.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 3 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT								
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2,422,121	2,562,828	2,703,535	2,343,025	2,621,604	2,647,971

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian mengalami fluktuatif, Tahun 2023 capaian belum terealisasi dan mencapai target yang ditentukan. Namun pada tahun 2024, Rata-rata pengeluaran per Kapita masyarakat Kota Denpasar berhasil melampaui target dan Tahun 2025 capaiannya belum terealisasi dan mencapai target yang ditentukan. Belum tercapainya dikarenakan jumlah pendapatan masyarakat yang belum meningkat dan daya beli masyarakat yang menurun. Pemerintah Kota Denpasar berusaha untuk memberikan layanan serta memiliki program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat seperti: program pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dll yang diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat meningkat sehingga nilai rata-rata pengeluaran per kapita menjadi meningkat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 2 : MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT							
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2,647,971	1,964,618	1,569,088	134.782	168.758

Sumber : BPS 2025 (Data diolah)



Dapat diketahui bahwa Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tingkat Nasional Tahun 2025 yakni Rp. 1.569.088. Sedangkan di Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp. 1.964.618 (sumber :bps.go.id). Adapun rata-rata pengeluaran perkapita Kota Denpasar Tahun 2025, dijelaskan pada tabel dibawah.

Dari tabel dan gambar diatas dapat dikatakan capaian rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Denpasar melampaui target yang ditetapkan. Rata-rata pengeluaran per kapita Sebulan di Kota Denpasar Tahun 2025 yakni sebesar **Rp 2.647.971** menjadi yang tertinggi kedua di tingkat Kabupaten/Kota di Bali bahkan melebihi Provinsi Bali dan Nasional. Persentase capaian dengan provinsi mencapai 134.782% dan dengan nasional mencapai 168.758%. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Denpasar tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Denpasar. Terinci pengeluaran per kapita sebulan Kota Denpasar (rupiah) Tahun 2025 berdasarkan kelompok komoditas seperti tabel di bawah.

Kelompok Komoditas	Distribusi Pengeluaran			Total Rata-Rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Padi-padian	77.736	95.715	111.514	91.694
2 Umbi-umbian	3.930	6.088	8.120	5.633
3 Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	39.326	53.271	64.900	50.027
4 Daging	46.314	69.359	93.880	65.061
5 Telur dan Susu	33.896	55.747	118.162	59.520
6 Sayur-sayuran	52.985	67.331	87.941	65.727
7 Kacang-kacangan	14.970	15.083	16.473	15.317
8 Buah-buahan	27.020	53.237	100.165	52.161
9 Minyak dan Kelapa	15.775	17.007	19.787	17.071
10 Bahan Minuman	14.961	21.349	30.403	20.610
11 Bumbu-bumbuan	12.241	15.468	22.984	15.684
12 Bahan Makanan Lainnya	11.849	14.605	14.891	13.561
13 Makanan dan Minuman Jadi	267.929	461.000	757.858	443.314
14 Rokok dan Tembakau	50.973	83.872	115.881	77.136
Jumlah Makanan	669.905	1.029.131	1.562.960	992.516
15 Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	424.017	849.127	1.718.074	853.333
16 Aneka Barang dan Jasa	158.537	302.919	991.678	383.230
17 Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	17.731	40.123	88.990	40.965
18 Barang Tahan Lama	18.610	58.511	543.432	139.738
19 Pajak, Pungutan, dan Asuransi	54.100	103.052	236.079	110.143
20 Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	45.181	110.181	328.980	128.045
Jumlah Bukan Makanan	718.177	1.463.913	3.907.234	1.655.455
Total Pengeluaran Kota Denpasar	1.388.082	2.493.044	5.470.194	2.647.971

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Makanan	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Jumlah
Jembrana	671.890,00	643.357,00	1.315.247,00
Tabanan	727.267,00	992.638,00	1.719.905,00
Badung	1.098.546,00	1.611.184,00	2.709.730,00
Gianyar	888.989,00	1.392.447,00	2.281.435,00
Klungkung	756.838,00	760.258,00	1.517.096,00
Bangli	713.316,00	671.354,00	1.384.669,00
Karang Asem	529.157,00	551.100,00	1.080.257,00
Buleleng	587.792,00	516.982,00	1.104.774,00
Kota Denpasar	992.516,00	1.655.455,00	2.647.971,00
Bali	827.210,00	1.137.408,00	1.964.618,00

Untuk meningkatknya pendapatan masyarakat Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan beberapa strategi dan upaya yaitu meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, mendorong tumbuhnya investasi, mendorong tumbuhnya sektor pariwisata, mendorong peningkatan ekspor, dan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan. Dengan adanya beberapa strategi dimaksud, program yang mendukung guna mencapai strategi tersebut adalah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan UMKM, Program Promosi Penanaman Modal, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran

Pariwisata, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

4) Sasaran Mengurangi kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Mengentaskan Kemiskinan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN										
4	Angka Kemiskinan	Persen	1.99	2.59	99.698	1.97	2.16	99.903	1.95	99.892
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					99.903					

Dari Tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 1,97% namun capaian kinerja sasaran ini belum mencapai target sebesar **99,90% (Baik)** dan adapun capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD adalah 99,89% (Baik).

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN								
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,01	1,99	1,97	2,68	2,59	2,16

Dari tabel diatas, capaian realisasi memang belum mencapai target yang ditentukan, namun persentase angka kemiskinan di Kota Denpasar selalu turun dari Tahun 2023-2025.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 4 : MENGURANGI KEMISKINAN							
4	Angka Kemiskinan	Persen	2,16	3,72	8,47	100.419	100.744

Data diatas, memperlihatkan bahwa angka kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2025 lebih rendah dari capaian Provinsi Bali maupun Tingkat Nasional. Hal tersebut merupakan prestasi yang cukup baik dan kedepannya setiap tahun angka kemiskinan diharapkan menurun lagi.

Tabel 3.11 Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2025.

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan - Maret (Rp)	Garis Kemiskinan - September (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu) (Ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu) (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret
Jembrana	554.136	...	12,45	...	4,33
Tabanan	628.223	...	19,45	...	4,23
Badung	769.560	...	14,66	...	1,90
Gianyar	522.497	...	20,00	...	3,71
Klungkung	427.844	...	9,48	...	5,18
Bangli	486.007	...	11,28	...	4,83
Karang Asem	453.685	...	27,32	...	6,40
Buleleng	592.706	...	35,39	...	5,20
Kota Denpasar	862.522	...	23,20	...	2,16
Bali	607.847	642.986	173,24	160,09	3,72

(Sumber: BPS Bali, 2025)

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024 dengan persentase sebesar 9,03 persen (sumber: <https://bps.go.id>). Berdasarkan gambar tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Kemiskinan di Kota Denpasar pada Tahun 2025 yakni **2,16 persen**. Tingkat kemiskinan di Kota Denpasar menurun dari tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Bali sebesar 3,72 persen dan Nasional sebesar 8,47 persen.

Adapun Analisis Ketidaktercapaian sesuai target yang ditetapkan yakni sebagai berikut :

1. masih tingginya fungsi sosial yang terganggu di masyarakat serta belum optimalnya akurasi data kesejahteraan sosial;
2. bantuan belum optimal bagi luasan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang tinggi
3. Masih belum optimalnya pelatihan dan pengembangan usaha bagi kelompok kurang mampu dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Adapun Hambatannya dalam menanggulangi kemiskinan adalah Kesulitan dalam pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Karena mobilitas penduduk yang tinggi.

Adapun Solusi yang diberikan untuk mengurangi kemiskinan yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN)
2. Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi keluarga tidak mampu serta pembentukan usaha bersama stake holder lintas sektor dalam menangani hal tersebut.

Program yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana.

Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar

Tujuan terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Kota Denpasar pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA
- b. Menurunnya kasus kriminalitas
- c. Meningkatkan ketahanan pangan
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana

5) Sasaran Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA

Penegakan PERDA harus dilaksanakan karena sesuai dengan misi kedua RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar yakni Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan untuk terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar. Berikut tabel analisis sasaran Meningkatnya

Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA.

Sasaran ini terdapat pada PK Walikota Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dimana Tahun 2025 merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA										
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	89.84	93.84	104.452	93.85	94.59	100.788	90.84	104.128
Rata-rata Kinerja Sasaran 5 :					100.788					

Dari tabel diatas diketahui bahwa Capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100,788% (Baik Sekali) yang diperoleh dari target 93,85% dan terealisasi sebesar **94,59%**. Capaian Realisasi Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD adalah 104,12%. Capaian Tahun 2025 yakni 94,59 % ini di dapat dari perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali

Capaian =

x100 %

Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data penegakan perda dan perwali pada tahun 2025 di dapat hasil sebagai berikut

544

x100% = 94,59%

575

Realisasi 94,59 % didapat dari Dari total jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perwali sejumlah 544 kasus yang terselesaikan dibagi dengan total jumlah kasus pada tahun 2025 sejumlah 575 pelanggaran dikali 100%. Dari 544 kasus tersebut terdiri atas beberapa jenis pelanggaran, yaitu Bangunan sebanyak 134 kasus, pelanggaran reklame sebanyak 184, ijin usaha 5 kasus, ketertiban umum 221 kasus. Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan pelanggaran secara yustisi yang masih dipantau proses penyidikannya.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA								
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	89,34	89,84	93,85	89,58	93,84	94,59

Dari data diatas, Capaian Persentase penegakan Perda dari Tahun 2023-2025 selalu meningkat dan telah melampaui target yang ditetapkan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 5 : MENINGKATNYA UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN PERDA							
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	94,59	100	-	94.59	-

Capaian Penegakan Perda Kota Denpasar Tahun 2025, masih berada dibawah Provinsi yakni dengan standar 100%. Pemerintah Kota Denpasar wajib kedepannya untuk mencapai target maksimal sesuai dengan standar Provinsi.

Capaian dalam sasaran Strategis Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA sudah baik sekali, **namun ada beberapa permasalahan** dalam pelaksanaannya yakni sebagai berikut:

1. Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada.
2. Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
3. Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP
4. Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada
5. Belum optimalnya anggaran dan kesiapan unsur masing masing anggota Linmas

Dalam kurun waktu tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah berupaya secara optimal melaksanakan tugas pokok fungsinya selain dalam upaya menciptakan Ketertiban umum dan

Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perwali serta Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat memenuhi target RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Namun, masih terdapat beberapa factor yang mempengaruhi Sat.Pol PP Kota Denpasar dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

- Peran Sat.Pol. PP dalam Penegakan Perda dan Perwali bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi (*unpredicTabel*).
- Posisi Strategis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat mobilitas pertumbuhan pembangunan, perekonomian yang sangat pesat.
- Mobilitas penduduk pendatang yang semakin meningkat.
- Serta faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang tidak mendukung saat penertiban, konflik kepentingan dengan masyarakat/ormas, serta keterbatasan sumber daya aparatur Serta sarana dan prasarana.
- Dalam Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, terdapat pula faktor yang mempengaruhi jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas.

Program yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda, kedua kegiatan tersebut dimaksimalkan dengan sosialisasi perda kepada masyarakat, kemudian meningkatkan patroli dan cegah dini pelanggaran perda.

Inovasi yang dilaksanakan adalah Inovasi Garbasita (Gerakan Bersama Siaga Kota) dengan memanfaatkan fitur Wa Chat BOT untuk melaporkan setiap pelanggaran perda yang ada di Kota Denpasar Oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat Kota Denpasar dalam deteksi dini pelanggaran perda. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mengembangkan Inovasi “GARBASITA”. yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Bersama Siaga Kota. Adalah Strategi Deteksi Dini Penegakan Perda secara Humanis, Edukatif, Responsif dan Kolaboratif dengan semangat Vaisudhaiva Kuthumbakam”. Gagasan Inovasi tersebut merupakan suatu terobosan strategis, dibangun untuk menjawab kepastian dan kejelasan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat secara humanis, edukatif, responsif dan kolaboratif dalam semangat gotong royong gerakan bersama di wilayah Kota Denpasar. Keterbatasan sumber daya manusia serta belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi yaitu melalui chat Whatsapp BOT untuk memberikan informasi terupdate selain itu kesadaran partisipasi masyarakat sebagai upaya cegah dini gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan, merupakan suatu tantangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dengan mengedepankan nilai-nilai humanis, edukatif, responsif dan kolaboratif. Melihat hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat serta menggunakan teknologi sebagai penerapan digitalisasi. Partisipasi tersebut melalui kolaborasi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia agar dapat lebih berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Denpasar Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

Satpol PP senantiasa perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menyelesaikan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Untuk mengoptimalkan kinerja tentunya Satpol PP memerlukan keterlibatan dan kolaborasi serta sinergitas dengan berbagai stakeholder, terutama dengan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan factor yang sangat penting terlebih didukungnya sarana prasaran digitalisasi dalam mempercepat pelaksanaan tugas.

Adapun Solusi yang dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Perda/Perkada
Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran: Mengoptimalkan media sosial, kampanye publik melalui televisi, radio, dan media cetak untuk mengedukasi masyarakat mengenai Perda/Perkada yang baru. Mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di lingkungan Desa atau kelurahan.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Jumlah Aparatur Satpol PP Rekrutmen dan Penambahan Personel: Melakukan rekrutmen personel Satpol PP melalui PPPK sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan dan Pendidikan Berkala: Memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi petugas Satpol PP terkait penegakan hukum, pengendalian kerumunan, penanganan masalah sosial, serta teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk pemantauan dan penegakan Perda. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja: Membuat sistem evaluasi dan pelatihan berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap petugas Satpol PP memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.
3. Optimalisasi Sinergitas Antar Perangkat Daerah dan Satpol PP Forum Koordinasi Rutin: Mengadakan forum koordinasi rutin antara Satpol PP dan perangkat daerah penginisiasi Perda (misalnya Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial) untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan Perda/Perkada. Pembentukan Tim Gabungan: Membentuk tim gabungan lintas perangkat daerah yang berfokus pada pengawasan dan penegakan Perda, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan kebijakan. Sistem Laporan Terpadu: Membuat sistem laporan terpadu antara Satpol PP dan perangkat daerah terkait, untuk memudahkan koordinasi dalam menangani permasalahan yang ada di lapangan.
4. Optimalisasi Anggaran dan Kesiapan Anggota Linmas Pengalokasian Anggaran Khusus: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan Linmas, mulai dari perlengkapan,

pelatihan, hingga fasilitas operasional yang memadai. Penyuluhan dan Pembekalan: Melakukan pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif bagi anggota Linmas agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Membangun kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan perlengkapan dan fasilitas bagi Linmas. Misalnya, perusahaan lokal dapat menyediakan sarana pendukung atau perangkat yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR). Evaluasi dan Penyempurnaan Struktur Organisasi Linmas: Meninjau kembali struktur organisasi Linmas agar lebih efisien dan dapat menanggapi dinamika perubahan yang ada, termasuk mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam konteks ketertiban masyarakat.

6) Sasaran Menurunnya Kasus Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana (crime crite) dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana yang dilaporkan dengan jumlah penduduk.

Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

Angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan/pidana (crime rate) memberikan gambaran besarnya risiko kejadian tindak pidana yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat.

Secara umum sejak tahun 2013 sampai dengan 2025sakup, risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) menunjukkan kecenderungan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2013 tercatat risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) di Bali sebesar 207,58 per seratus ribu penduduk. Angka ini terus menurun hingga pada capaian terendah tahun 2018 sebesar 68,92. Risiko penduduk terkena tindak pidana mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 77,61, namun kembali menurun menjadi 66,72 per seratus ribu penduduk pada tahun 2020 dan 61,66 per seratus ribu

penduduk pada tahun 2021. Pada tahun 2022 risiko penduduk terkena tindak pidana Kembali meningkat menjadi 89,35 per seratus ribu penduduk, dan mencapai puncak tertinggi di tahun 2023 sebesar 450,8 per seratus ribu penduduk. Pada Tahun 2024 risiko tindak pidana di Kota Denpasar menurun menjadi 292,23 per seratus ribu penduduk (Sumber : Statistik Kriminal Provinsi Bali 2024, Publikasi BPS 2025). Adapun analisis ketercapaian sasaran dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Menurunnya Kasus Kriminalitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS										
6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105.53	450.8*	96.728	105.43	292.23*	98.228	105.33	98.225
Rata-rata Kinerja Sasaran 6 :					98.228					

Risiko penduduk terkena tindak pidana (crime rate) didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak pidana merupakan hasil bagi jumlah tindak pidana yang dilaporkan dengan jumlah penduduk. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan Tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak pidana mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak pidana semakin kecil.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS								
6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	105.63	105.53	105.43	153.69*	450.8*	292.23*

Dikarenakan Angka Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana belum keluar dari BPS bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia, maka data realisasi yang digunakan adalah data realisasi pada Tahun n-1. Pada Tahun 2021, Angka risiko penduduk terkena tindak pidana di Kota Denpasar sebesar 89,83 per seratus ribu penduduk. Angka pada Tahun 2022, yakni 153,69 per seratus ribu penduduk, untuk Tahun 2023 sebesar 405,8, Pada Tahun 2024 sebesar 292,23 dan untuk Tahun 2025 belum rilis dari BPS terkait Statistik Kriminal Provinsi Bali yang dihimpun melalui data Kepolisian Republik

Indonesia. Untuk capaian tahun 2024 masih menggunakan angka capaian Tahun 2023, yaitu 405,8 sedangkan untuk capaian Tahun 2025 menggunakan angka capaian Tahun 2024 **yaitu sebesar 292,23**.

Dari analisis tabel diatas, realisasi sasaran belum melampaui target yang ditetapkan yakni dengan capaian kinerja sebesar 98,22% (Baik). Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 98,22% (Baik). Hal tersebut menunjukkan tingkat keamanan di Kota Denpasar harus ditingkatkan dan dijaga lagi.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 6 : MENURUNNYA KASUS KRIMINALITAS							
6	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	Angka	292,23	124,15	204	98.646	99.567

Dari data diatas, Risiko Penduduk terjadi tindak pidana di Kota Denpasar masih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut dikarenakan berbagai factor dan Denpasar sebagai Pusat Kota Bali serta menjadi tempat dari berbagai macam penduduk yang heterogen sehingga keamanan harus dijaga secara ketat.

Analisis ketidaktercapaian belum mencapai target yang ditentukan karena masih tinggi kasus tindak pidana di Kota Denpasar dikarenakan Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Bali serta menjadi wilayah padat penduduk pendatang (heterogen).

Adapun analisis dan solusi yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka kriminalitas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Denpasar bersama aparat keamanan Polri/TNI harus melaksanakan kolaborasi untuk mengamankan wilayah Kota Denpasar secara rutin sesuai peran dan tugas masing-masing.
2. Melaksanakan Patroli Rutin yang dilakukan oleh Pecalang (Polisi Adat) bersama Lurah/Camat serta Kaling dan Lembaga Banjar Adat, guna menurunkan angka kriminalitas di lingkungan masing-masing.
3. Memperketat area keamanan di wilayah sebagai pintu masuk ke Kota Denpasar secara khusus, dan Bali secara umum.
4. Masyarakat yang aktif melaporkan dan ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
5. Adanya Laporan cepat tanggap dari masyarakat ke pihak yang berwenang (Lembaga Banjar Adat, Desa Adat, serta Pecalang/Polisi Adat serta pihak kepolisian) apabila terjadi kasus kriminalitas yang terjadi dilingkungan masing-masing.

7) Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 7 : MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN										
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	94	96.37	102.521	96	83.79	87.281	94.6	88.572
Rata-rata Kinerja Sasaran 7 :					87.281					

Berdasarkan tabel diatas nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2025 yakni 83,79. Pada Tahun 2025, pengukuran indeks Ketahanan Pangan secara nasional **mengalami perubahan yang semula memiliki 6 indikator kemudian menjadi 12 indikator (sumber nilai FVSA 2025 Badan Pangan Nasional Tahun 2025)**. Hal ini yang membuat nilai **indeks ketahanan pangan setiap daerah mengalami penurunan**. Walaupun

demikian, pemerintah Kota Denpasar terus berupaya dalam peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dari tahun ketahun.

Capaian Realisasi Indeks Ketahanan Pangan yakni sebesar 87,28% (Baik), dikarenakan adanya perubahan dan penambahan indikator pembagi dalam pengukuran indeks tersebut. Hal tersebut membuktikan masih terdapat keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar.

Gambar IKP Kab/Kota se-Bali Tahun 2024

BADAN PANGAN NASIONAL		NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)		Beranda Dataset Visualisasi Infografis Publikasi SIP Daerah Katalog Jadwal Pandua			
10		entries per page		Search: bali			
NOMOR PER TAHUN	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB/KOTA	NAMA KABUPATEN	TIPE	TAHUN	IKP
142	33	Jawa Tengah	3303	Purbalingga	Kabupaten	2024	78.47
206	51	Bali	5101	Jembrana	Kabupaten	2024	87.64
207	51	Bali	5102	Tabanan	Kabupaten	2024	92.51
208	51	Bali	5103	Badung	Kabupaten	2024	92.90
209	51	Bali	5104	Gianyar	Kabupaten	2024	92.77
210	51	Bali	5105	Klungkung	Kabupaten	2024	87.47
211	51	Bali	5106	Bangli	Kabupaten	2024	77.19
212	51	Bali	5107	Karangasem	Kabupaten	2024	83.97
213	51	Bali	5108	Buleleng	Kabupaten	2024	83.26
485	51	Bali	5171	Kota Denpasar	Kota	2024	96.37

Gambar IKP Kab/Kota se-Bali Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL

NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)

Beranda

Produk Diseminasi

SIP Daerah

Katalog

10

entries per page

NOMOR	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	TIPE	TAHUN	IKP
142	Jawa Tengah	Purbalingga	Kabupaten	2025	75.1876306313342
206	Bali	Jembrana	Kabupaten	2025	78.042381159202
207	Bali	Tabanan	Kabupaten	2025	77.7915430357417
208	Bali	Badung	Kabupaten	2025	88.7871815812257
209	Bali	Gianyar	Kabupaten	2025	83.3077978864844
210	Bali	Klungkung	Kabupaten	2025	73.7870243353096
211	Bali	Bangli	Kabupaten	2025	74.1747772323669
212	Bali	Karangasem	Kabupaten	2025	75.7246936268019
213	Bali	Buleleng	Kabupaten	2025	75.7642023462552
480	Bali	Kota Denpasar	Kota	2025	83.7935451063133

Sumber : Badan Pangan Nasional, IKP Kab/Kota seBali 2024 dan 2025

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan perhitungan dari Badan Pangan Nasional peringkat IKP Kota Denpasar Tahun 2025 adalah **83,793**. Hal tersebut membuktikan masih terdapat keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 7: MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN								
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	93.7	94	96	95.8	96.37	83.79

Dari data diatas, pada Tahun 2023 dan 2024, Indeks Ketahanan Pangan melampaui target namun pada tahun 2025, nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar menurun dan belum mencapai target dikarenakan ada perubahan dan penambahan indikator dalam perhitungan Indeks Ketahanan Pangan serta IKP setiap daerah secara nasional menurun.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 7: MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN							
7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83.79	79.88	-	104.894	-

Sumber : Badan Pangan Nasional 2025 (data diolah)

Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar pada tahun 2025 melebihi dari Capaian Provinsi Bali dan Kabupaten sekitar.

Solusi dalam meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Pangan kedepan yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah
2. Menjaga kestabilan harga Sembako setiap tahunnya
3. Menjaga kestabilan serta kecukupan ketahanan pangan di Kota Denpasar
4. Menekan harga inflasi pada barang
5. Meningkatkan produktivitas pertanian serta sumber daya pangan di Kota Denpasar.

8) **Sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana**

Kota Denpasar merupakan daerah yang sangat rawan bencana yang diakibatkan oleh alam, non alam dan juga ulah manusia. Beberapa bencana pernah melanda di Kota Denpasar di antaranya banjir, kebakaran, gempa bumi, erosi/abrasi pantai, angin puting beliung, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan lain-lain. Cakupan pelayanan BPBD Kota Denpasar tersedia beberapa pos dan lokasi yang menyesuaikan dengan jangkauan pelayanannya.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana dan juga pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali		
Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Badung	0,70	114,52
Bangli	0,51	102,84
Buleleng	0,75	118,31
Gianyar	0,53	120,05
Jembrana	0,65	153,46
Karang asem	0,71	131,44
Klungkung	0,55	149,50
Kota Denpasar	0,60	103,31
Tabanan	0,64	116,72

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

 Raditya Jati

(sumber : Lampiran surat BNPB No B-46/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 terkait penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Bali)

Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 8 : MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA										
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	95.76	90.18	100.058	90.1	103.31	99.853	90.1	99.853
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					99.853					

Dari Tabel diatas Indeks Risiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diketahui Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana yaitu 99,85 (Baik). Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD yaitu sebesar 99,85 (Baik).

Nilai Indeks Risiko Bencana semakin kecil berarti semakin baik, dimana risiko bencana pada suatu daerah dilihat dari seberapa besar/kecil suatu risiko..Indeks Risiko Bencana mengalami peningkatan dan belum mencapai target yang ditetapkan yakni dengan Indeks **103,31** dari target 90,1. Pada tahun 2024, capaian Indeks Risiko Bencana sebesar 90,18.

Gambar 3.2 Indeks Risiko Bencana Kota Denpasar dari Tahun 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Risiko Bencana	-	101,78	98,72	95,76	90,10	106,70	104,39	98,18	90,13	103,31

Sumber : BNPB, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kota Denpasar (Januari, 2026)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 8: MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA								
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	98.72	95.76	90.10	98.18	90.18	103.31

Capaian Indeks Risiko Provinsi Bali Tahun 2025 yakni 123,35 dengan Capaian Indeks Risiko Kota Denpasar sebesar 103,31. Indeks Risiko Kota Denpasar terendah ke-2 setelah Kabupaten Bangli. Hal ini menyatakan bahwa risiko bencana masih relative rendah dari kabupaten lainnya di Bali.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 8: MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN DAN UPAYA PENANGANAN BENCANA							
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103.31	123.35	-	100.1624645	-

Indeks Risiko Bencana Kota Denpasar 2025, lebih rendah dibandingkan capaian provinsi Bali. Hal tersebut merupakan hal yang baik dimana semakin rendah risiko bencana maka bencana tidak berdampak begitu besar pada daerah tersebut. Paradigma penanganan bencana saat ini yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, dan lapisan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan upaya yang sistematis dalam penanggulangan dampak dan mengurangi bencana secara komprehensif.

Analisis Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam menghadapi bencana <u>Sasaran:</u> Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Risiko Bencana	90,10	103,31	99,85	- Adanya kejadian bencana banjir di wilayah Kota Denpasar pada September tahun 2025 hingga dikeluarkannya status tanggap darurat bencana banjir. - Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan <i>baseline</i> yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan.	- Koordinasi terkait pemutakhiran <i>baseline</i> perhitungan IRB. - Memperbaharui secara berkala terkait dokumen kebencanaan sesuai dengan kondisi di daerah. - Koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan bencana

Sumber : BNPB, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kota Denpasar (Januari, 2026)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja berupa realisasi Indeks Risiko Bencana telah jauh melampaui target, dimana lonjakan capaian tersebut disebabkan karena adanya kejadian banjir di wilayah Kota Denpasar pada September 2025 hingga dikeluarkannya status tanggap darurat bencana banjir serta nilai IRB 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimuktahirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan.

Adapun solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi terkait pemuktahiran *baseline* perhitungan IRB, memperbaharui secara berkala terkaitdokumen kebencanaan sesuai dengan kondisi di daerah, koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan bencana serta terus

meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dengan cara mensosialisasikan risiko dan mitigasi risiko bencana kepada masyarakat umum.

Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

9) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik yang baik merupakan ukuran yang penting dalam reformasi birokrasi, maka dari itu upaya dalam perbaikan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Pelayanan Publik penting dan sangat terkait dengan mensejahterakan rakyat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan.

Untuk mewujudkan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan yang baik diharapkan hadir dalam dengan masyarakat sehingga akan mencapai tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel. 3.16 Analisis Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 9 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										
9	Rata-Rata SKM	Persen	91.91	91.78	99.858	91.79	92.29	100.544	89.66	102.933
	Rata-rata Capaian Kinerja 9 :				100.544					

Dari Tabel 3.16 Dapat diketahui bahwa pada tabel diatas untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat Indikator Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat. Pada Indikator Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat capaiannya diperoleh dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kesehatan, Investasi, Kependudukan dan Kategori Perangkat Daerah Lainnya. Nilai rata-rata SKM Tahun 2024 adalah 91,78 dimana berdasarkan interval kepuasan masyarakat nilai tersebut masuk ke dalam kategori kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Pada Tahun 2025, Nilai rata-rata SKM adalah **92,29** mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2025, penilaian SKM dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yakni, 35 Perangkat Daerah, 10 Bagian di lingkungan Setda Kota Denpasar, 11 Puskesmas di Kota Denpasar, 43 Desa/Kelurahan di Kota Denpasar. Dari data tersebut sebanyak 67 perangkat daerah mendapatkan nilai Sangat Baik dan 32 perangkat Daerah mendapatkan nilai Baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Denpasar mencapai **92,29 (Sangat Baik)**.



Sumber : Bagian Organisasi Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi nilai SKM dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 yang diperoleh atas hasil akumulasi capaian Semester I dan Semester II Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan perolehan nilai pada periode Semester I dan Semester II Tahun 2024, namun secara kualitas nilai SKM yang diperoleh Pemerintah Kota Denpasar menunjukkan konsistensi kategori “Sangat Baik” dari Tahun 2022-2025. Untuk mendorong peningkatan capaian, maka akan dilakukan perbaikan dan sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh Perangkat Daerah. Pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu Semester I Tahun 2025 sebesar 91,34 dan Semester II Tahun 2025 sebesar 92,25 dengan akumulasi rata-rata capaian nilai SKM Tahun 2025 Kota Denpasar yaitu **92,29**.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai pada perangkat daerah diharapkan baik dan mampu mendukung penilaian kinerja dari perangkat daerah tersebut. Rata-rata SKM Kota Denpasar didukung dengan nilai SKM Perangkat Daerah yang memberikan hasil pada SKM Kota Denpasar. Dapat disimpulkan pelayanan di lingkungan Kota Denpasar baik. Adapun realisasi capaian kinerja tahun 2025 yakni 100,544 (Sangat Baik), Pemerintah Kota Denpasar tetap meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat maupun pengguna layanan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 9: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK								
9	Rata-Rata SKM	Persen	88.16	91.91	91.79	91.90	91.78	92.29

Dilihat dari table diatas rata-rata SKM mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif).

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 9: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
9	Rata-Rata SKM	Persen	92.29	-	-	-	-

Adapun hal yang perlu dilaksanakan dan ditingkatkan guna meningkatkan nilai SKM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan mutu layanan di setiap layanan baik internal maupun eksternal.

2. Melakukan pembinaan terkait pengumpulan data-data survey SKM sehingga hasil penilaian tepat sasaran terhadap pengguna layanan.
3. Memberikan kompensasi apabila layanan yang diberikan tidak memenuhi target pada penerima layanan.
4. Semua Perangkat Daerah diharapkan meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan baik berupa pemenuhan sarpras yang memadai dan inovasi yang mempercepat layanan bagi masyarakat maupun pengguna layanan.

10) Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar, inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yaitu menciptakan *Sang Sewakadarma* agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja *Sewakadarma*. *Sewakadarma* adalah Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mengandung arti bahwa pengabdian dan pelayanan adalah kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat. *Sang Sewakadarma* memiliki peran dan tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan penghubung yang dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sejak dibangunnya inovasi *Sang Sewakadarma* pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 10 orang agen perubahan yang disebut dengan *Sang Sewakadarma* dengan kategori 4 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, dan 6 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Utama. Di Tahun 2019, Pemerintah Kota Denpasar melahirkan 19 orang *Sang Sewakadarma*, dengan kategori 2 orang sebagai *Sang Sewakadarma* Mahotama, 12 orang *Sang Sewakadarma* Utama, 4 orang *Sang Sewakadarma* Madya dan 1 orang kategori *Sang Sewakadarma* Pratama. Di Tahun 2020 jumlah Agen Perubahan Kota Denpasar mengalami peningkatan dengan jumlah 13 orang *Sang Sewakadarma* dengan kategori Mahotama sebanyak 8 orang, kategori Utama sebanyak 3 orang dan kategori Madya sebanyak 2 orang. Pada Tahun 2022, jumlah *Sang Sewakadarma* sebanyak 6 orang dengan kategori Mahotama. Pada Tahun 2023 dan 2024, jumlah *Sang Sewakadarma* masih 6 orang dengan kategori Mahotama. Pada Tahun 2025 terdapat 25 Agen perubahan dengan rincian *Sang Sewakadarma* Mahotama

19 orang , Sang Sewakadarma utama 5 orang, Sang Sewakadarma madya 1 orang.

Dengan adanya Sang Sewakadarma (agen perubahan) diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif di Perangkat Daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pengaruh yang baik terkait (good governance) di lingkungan Perangkat Daerah.

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6				7	8
SASARAN 10 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI										
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB(77,50)	BB(76,92)	99,251	BB(78,35)	BB(76,98)	98.251	A (80)	96.225
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					99.125					

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas adalah 99,125 (Baik). Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD adalah 98,112. Dalam meningkatkan Kapasitas Akuntabilitas didukung oleh 2 IKU yakni Predikat SAKIP dan Opini BPK.

Pada Tahun 2021, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah, Kota Denpasar mendapatkan hasil 74,57. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar mendapat nilai 75,77 dengan predikat BB melebihi target yakni 75,50. Pada Tahun 2023, target dalam Perjanjian Kinerja Walikota dinaikkan menjadi 80,01 (A) namun hasil yang dicapai yakni 76,82. Pada Tahun 2024, Target disesuaikan Kembali yakni 77,50 dengan realisasi nilai SAKIP yakni 76,92 (BB). Pada Tahun 2025, nilai SAKIP kota Denpasar yakni **76,98 (BB)** dari target 78,35. Walaupun belum mencapai target, nilai SAKIP Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 10: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI								
10	Predikat SAKIP	Predikat	A (80,01)	BB (77,50)	BB (78,35))	BB (76,82)	BB (76,92)	BB (76,98)
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Target SAKIP Kota Denpasar Tahun 2023 sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yakni 76,45 dan capaian Tahun 2023 sebesar 76,82. Pada Tahun 2024 nilai SAKIP Kota Denpasar meningkat menjadi 76,92 dan Pada Tahun 2025

meningkat Kembali menjadi 76,98. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan namun Komitmen Pimpinan dari Pemerintah Kota Denpasar sangat kuat sehingga dari tahun ke tahun realisasi Nilai SAKIP Kota Denpasar terus meningkat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 10: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI							
10	Predikat SAKIP	Predikat	BB(76,98)	BB(79,73)	-	96.55	-
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	100

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar Pada Tahun 2025 telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2025, namun dari Tahun 2012 hingga tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar **menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 14 (empat belas) kali berturut-turut dari BPK.**

Adapun analisis kegagalan dan keberhasilan yang dilakukan yakni melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam sistem evaluasi SAKIP untuk tahun berikutnya. Pemerintah Kota Denpasar dari tahun-ketahun telah melaksanakan rekomendasi dari LHE AKIP Tahun sebelumnya guna untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP.

Adapun Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP dan mempertahankan Opini WTP dari BPK adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimtek terkait SAKIP kepada semua Perangkat Daerah guna memeatangkan pelaksanaan evaluasi SAKIP.
2. Melaksanakan Klinik SAKIP, dimana Bappeda menjadi coaching dalam perencanaan kinerja dan penyusunan IKU Perangkat Daerah.
3. Tim SAKIP Kota Denpasar terus berkoordinasi dengan Pusat yakni Kemenpan RB untuk tetap dibimbing terhadap pelaksanaan SAKIP.
4. Melaksanakan studi tiru ke Pemda dengan Indeks SAKIP yang lebih baik sehingga mampu menerima best practice dari Pemda tersebut dan diimplementasikan di Kota Denpasar.
5. Menindaklanjuti hasil rekomendasi LHE SAKIP tahun kemarin, dan melaksanakan inovasi terbaru untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP.

6. Melaksanakan arahan, serta tindaklanjut temuan dari BPK.
7. Melaksanakan evaluasi internal dalam pengawasan sehingga meminimalisir temuan dari BPK.

Tujuan 4. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah di Kota Denpasar pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengurangi Pengangguran
- b. Optimalnya Pemanfaatan Teknologi
- c. Meningkatnya Inovasi Daerah

11) Sasaran Mengurangi Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka dalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 dari tahun 2019-2021 menyebabkan sektor pariwisata yang menjadi andalan dari Provinsi Bali baik di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada sektor pekerjaan dan tingkat pengangguran saat tersebut. Tahun 2025, persentase tingkat pengangguran di Kota Denpasar akan disajikan pada table berikut:

Tabel 3.18 Persentase Pengangguran Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2025

Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2025	
Kab. Jembrana		1,64
Kab. Tabanan		1,58
Kab. Badung		1,57
Kab. Gianyar		1,55
Kab. Klungkung		1,15
Kab. Bangli		0,73
Kab. Karangasem		1,80
Kab. Buleleng		1,51
Kota Denpasar		1,41
Provinsi Bali		1,49

Sumber : BPS Bali, 2025

Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	3,94	2,52	1,53
Kab. Tabanan	3,83	2,64	1,85
Kab. Badung	6,87	2,72	1,83
Kab. Gianyar	6,78	2,96	1,98
Kab. Klungkung	1,96	1,29	1,23
Kab. Bangli	0,76	0,75	0,74
Kab. Karangasem	3,09	2,61	1,63
Kab. Buleleng	5,20	3,60	2,06
Kota Denpasar	5,08	2,85	2,11
Provinsi Bali	4,80	2,69	1,79

Sumber: BPS Bali, 2024

Tingkat Pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025, jumlah pengangguran di Kota Denpasar sebesar 6.105 orang dan jumlah Angkatan kerja sebanyak 432.741 orang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar :

$$TPT = \frac{6.105\ orang}{432.741\ orang} \times 100\% = 1,41\%$$

Nilai tersebut mengalami penurunan pengangguran dari tahun lalu. Adapun tabel analisis capaian kinerja bisa dilihat di bawah ini

Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Mengurangi Pengangguran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 11 : MENGURANGI PENGANGGURAN										
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.8	2.11	100.246	2.10	1.41	100.328	6.62	100.787
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					100.328					

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja mengurangi pengangguran Tahun 2025 terealisasi sebesar 100,328 (Baik Sekali). Penurunan Tingkat pengangguran tidak lepas dari kemajuan ekonomi dan terserapnya tenaga kerja di Kota Denpasar.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 11: MENGURANGI PENGANGGURAN								
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.18	2.8	2.10	2.85	2.11	1.41

Anggka pengangguran Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 2,85 turun dan melampaui target dari 4,18. Tahun 2024 realisasi angka pengangguran turun Kembali menjadi 2,11 namun capaian ini masih diatas dari Provinsi Bali dan sudah berada dibawah Tingkat pengangguran terbuka nasional. Pada Tahun 2025 Angka Pengangguran Terbuka Kota Denpasar turun Kembali menjadi **1,41 %**. Angka pengangguran terbuka Nasional Tahun 2025 yakni sebesar 4,85%. Semakin kecil persentase Tingkat pengangguran terbuka, semakin bagus hasil yang didapat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 11: MENGURANGI PENGANGGURAN							
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1.41	1.49	4.85	100.053	100.709

(Sumber : BPS Nasional 2025, data diolah)

Capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2025, yakni 100,053 % terhadap capaian provinsi Bali dan 100,709% terhadap capaian Nasional. Dengan semakin turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar dari Tahun 2022-2025, diharapkan akan berlanjut turun ketahun-tahun berikutnya.

Program yang mendukung tercapainya IKU (menurunnya tingkat pengangguran terbuka) tahun 2025, terdapat 3 program yakni Program Pelatihan keterampilan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Program Penempatan tenaga kerja, dan Program Hubungan Industrial. Program yang telah dilakukan dinas tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran di kota denpasar, dengan melakukan pelatihan keterampilan serta uji kompetensi bagi pencari kerja, memfasilitasi/mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja melalui BKOL/JOBFAIR dan meningkatkan hubungan

industrial yang harmonis agar meminimalisir terjadinya PHK pegawai di Perusahaan.

Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Denpasar, yaitu dengan memaksimalkan kegiatan pelatihan keterampilan, memfasilitasi pemberi dan pencari kerja serta mensosialisasi peraturan ketenagakerjaan di Perusahaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dari Tahun 2018-2020 angka pengangguran terbuka Kota Denpasar mengalami peningkatan yakni pada tahun 2018 yaitu 1,87% menjadi 7,62% pada Tahun 2020. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengangguran.

Adapun analisis keberhasilan dari berkurangnya pengangguran yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Adapun permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Kota Denpasar yakni sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pencari kerja/tenaga kerja yang belum berkompeten dan tersertifikasi.
2. Belum sesuai antara lowongan yang tersedia dengan kompetensi pencari kerja
3. Hubungan industrial yang belum harmonis dan perlindungan tenaga kerja yang belum memadai

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pelatihan bagi pencari kerja yang berkompeten dan tersertifikasi
2. Peluang kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan Angkatan kerja
3. Belum optimalnya hubungan industrial yang harmonis dan belum sepenuhnya tenaga kerja yang tercover jaminan sosial

ketenagakerjaan.

Adapun Solusi yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah:

1. Adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
2. Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
3. Adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
4. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di Bidang
5. Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi.
7. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
8. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di Lembaga pendidikan/pelatihan, perusahaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi informasi pasar kerja (BKOL/Siap kerja)
9. Melakukan pendekatan secara persuasive terhadap penyelesaian kasus yang dilakukan secara mediasi (agar kasus dapat di selesaikan dengan Perjanjian Bersama)
10. Melakukan proses pengkajian untuk tenaga kerja yang belum tercovered perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

12) Sasaran Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemerintahan sangat massif dikarenakan oleh perkembangan zaman dan era digital. Perkembangan tetknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

SPBE juga merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.

Pemerintah Kota Denpasar tentu tidak ketinggalan untuk turut serta dalam menerapkan SPBE di lingkungan Pemenrintah Daerah. Hasil Indeks SPBE Kota Denpasar bisa dilihat dari table berikut :

Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI										
13	Indeks SPBE	Indeks	3.85	3.96	102.857	4	4.28	107	3.9	109.743
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :					107					

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran optimalnya pemanfaatan Teknologi adalah 107% (Baik Sekali). Indeks SPBE Kota Denpasar Tahun 2025 adalah **4,28** yang ditargetkan 4,00. Tahun 2021 Indeks SPBE Kota Denpasar sebesar 3,19 dengan predikat Baik meningkat menjadi 3,68 (Sangat Baik) pada Tahun 2022, dan Pada Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 3,8 dan Pada Tahun 2024 meningkat lagi menjadi

3,96 serta Pada Tahun 2025 Indeks SPBE Kota Denpasar meningkat lagi menjadi **4,28**.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI								
13	Indeks SPBE	Indeks	3.7	3.85	4.00	3.8	3.96	4.28

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 12 : OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI							
13	Indeks SPBE	Indeks	4.28	4.30	3.12	99,534	137,179



Sumber: LKJIP Diskominfo, 2025 (Kemenpan RB hasil SPBE)

Dari data diatas capain SPBE Kota Denpasar Tahun 2025 masih dibawah Provinsi Bali dan sudah diatas capaian Nasional.

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI							
NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	4.00	4.28	107%		
	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3,80	4.30	113.16%	Terpenuhinya pelaksanaan kebijakan SPBE	Peningkatan pelaksanaan kebijakan SPBE
	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3,90	4.40	112.82%	Terpenuhinya pelaksanaan tata kelola SPBE	Peningkatan pelaksanaan tata kelola SPBE
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	3.00	3.45	115%	Terpenuhinya pelaksanaan manajemen SPBE	Peningkatan pelaksanaan manajemen SPBE
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.95	4.51	114.17%	Terpenuhinya pelaksanaan layanan SPBE	Peningkatan pelaksanaan layanan SPBE

Dari Tahun 2022-2025 Indeks SPBE di Kota Denpasar selalu mengalami peningkatan, **Adapun analisis keberhasilan** tersebut dikarenakan terpenuhinya pelaksanaan kebijakan SPBE, terpenuhinya pelaksanaan tata Kelola SPBE, terpenuhinya pelaksanaan manajemen SPBE dan terpenuhinya layanan SPBE.

Pemerintah Kota Denpasar, telah menerapkan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, namun pada intinya perkembangan kondisi penerapan SPBE saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penerapan SPBE antara lain :

1. Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki acuan Peta Rencana SPBE yang menjadi referensi bagi tata kelola SPBE sehingga penerapan SPBE belum terpadu.
2. Secara umum SPBE sudah diterapkan di Kota Denpasar akan tetapi pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik perlu dipercepat dan dioptimalkan,hal ini terbukti dari masih belum optimalnya penggunaan aplikasi umum berbagi pakai antar OPD walaupun sampai saat ini Kota Denpasar sudah menerapkan integrasi antar sistem dan berbagi data melalui Pusat Data Kota Denpasar akan tetapi perlu dipercepat dan diperluas.
3. Jangkauan infrastruktur TIK yang didalamnya juga termasuk infrastruktur SPBE ke seluruh wilayah Kota Denpasar dan ke semua lapisan masyarakat perlu dioptimalkan.

Adapun Solusi atau Upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Peta Rencana SPBE sebagai acuan dalam

penerapan pelaksanaan SPBE untuk tahun 2021-2026 :

1. Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan Menyusun dokumen perencanaan SPBE lainnya seperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi, kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi.
2. Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan review fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana.
3. Peningkatan pelaksanaan kebijakan SPBE
4. Peningkatan pelaksanaan tata Kelola SPBE
5. Peningkatan pelaksanaan manajemen SPBE
6. Peningkatan pelaksanaan layanan SPBE

Beberapa Inovasi yang dilaksnakan Pemerintah Kota Denpasar untuk mempercepat SPBE antara lain seperti gambar dibawah :

INOVASI

APLIKASI DPS

Pembaharuan aplikasi Mobile PRO Denpasar, dengan konsep 'demi Denpasar - Denpasar satu', menyatukan seluruh aplikasi mobile yang sudah dimiliki oleh Pemkot Denpasar serta menambahkan fitur yang mampu mempermudah respon cepat dan tanggap aparatur pemerintah terhadap pengaduan online masyarakat.

GEN TIK

Agen Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju percepatan Implementasi Asas SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar, serta untuk mewujudkan Asas SPBE sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

RADITYA

Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya (Raditya) memberdayakan para penyandang disabilitas sebagai penyiar khusus, memberikan ruang bagi para lansia menyuarakan hal-hal melalui segmen Cita Sancaya serta bekerjasama dengan kelompok KISARA (Kita Sayang Remaja) untuk mengedukasi remaja perihal seksualitas dan juga permasalahan remaja lainnya.

OPEN DATA KEREN

Tata Kelola Penyelenggaraan Data dan Metadata Statistik Sektoral di Kota Denpasar berbasis KEREN (Kolaboratif, Efektif, Responsif, Efisien dan Normatif)

IDENTIK

Sistem Informasi dengan Tanda Tangan Elektronik yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Denpasar untuk memudahkan proses penandatanganan dokumen oleh pimpinan untuk bisa dilakukan dengan cepat, kapan dan dimana saja secara Elektronik.

SIPEDULI

SIPEDULI Sistem Informasi Pengawasan dan Evaluasi Layanan yang berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang menggunakan layanan SIPEDULI yang telah terintegrasi dengan aplikasi lain yang ada di Kota Denpasar dan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

DATA KEN

Agen teknologi informasi dan komunikasi menuju percepatan implementasi Asas SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar, serta untuk mewujudkan Asas SPBE sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

LAKON

Layanan Kota Denpasar Online. Mewakili inovasi jadi lebih simpel, hemat waktu, dan ruang. Dengan memanfaatkan layanan digitalisasi layanan publik yang berbasis teknologi yang lebih mudah, praktis, dan efisien.

DENPASAR SATU DATA

Strategi Data Terpadu melalui pendekatan pemanfaatan dan pengembangan data untuk informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien.

perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktikpraktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH										
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (71,17)	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (81,70)	100	Sangat Inovatif	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :					100					

Dari tabel diatas menunjukkan capaian kinerja sasaran 100% (Baik Sekali) serta capaian tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD sama yakni 100% (Baik Sekali) melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai capaian 100% dikarenakan masih menjadi daerah dengan redikat sangat inovatif. Capaian kinerja sudah melampaui target dengan skor 81,70. Dengan predikaitInovasi Daerah yaitu Sangat Inovatif diharapkan setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki inovasi menjadikan sistem pemerintahan yang cepat, agile dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan maksimal.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH								
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif (59.17)	Sangat Inovatif (71.17)	Sangat Inovatif (81.70)

Dilihat dari data diatas, predikat Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar dari Tahun 2023-2025 mengalami peningkatan. Dari Kota Inovatif menjadi Kota Sangat Inovatif.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 13 : MENINGKATNYA INOVASI DAERAH							
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif (81,70)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	100

Inovasi dan Solusi yang dilakukan pada tahun 2026 akan diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah dimana yang berisikan himbauan dan arahan sebagai berikut 1) setiap perangkat daerah harus menciptakan 1 inovasi baru setiap tahunnya; 2) setiap perangkat daerah diharuskan mengikuti Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah 2026.

Surat edaran ini diharapkan mampu untuk mendorong setiap perangkat daerah untuk menciptakan inovasi baru setiap tahunnya sehingga selalu ada inovasi yang bisa dilaporkan pada indeks Inovasi Daerah

Setiap tahun telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang akan dilaporkan pada IID di tahun berjalan sehingga ketika pelaporan dilaksanakan, inovasi telah memiliki data /bukti dukung yang dibutuhkan.

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi inovasi perangkat daerah yang akan dilakukan pada awal tahun, kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi dokumen inovasi yang akan menjadi data dukung inovasi yang akan dilaporkan pada Indeks Inovasi Daerah serta Kegiatan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar dilakukan untuk memotifasi perangkat daerah untuk membuat inovasi baru serta mengapresiasi inovasi yang telah terlaksana.

Serta dengan menambahkan kategori "Inovasi Tenaga Pendidik" pada Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah (KIPRAH) Kota Denpasar. hal ini membuat semakin banyak inovasi yang bisa diaring untuk dijadikan inovasi daerah serta semakin memotivasi seluruh aspek dalam Pemerintah Kota Denpasar dalam menciptakan inovasi baru dalam mendukung pencapaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan kajian-kajian baik

dengan Universitas di Denpasar untuk serta pembinaan kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di Kota Denpasar.

Adapun Prestasi yang didapatkan Tahun 2025 untuk mendukung peningkatan Inovasi Daerah Kota Denpasar yaitu:

1. Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik "INFORMATIF"
2. Penghargaan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASIK) dengan predikat "AA (Sangat Memuaskan)"
3. Penghargaan Penganugerahan BRIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indikator peran BRIDA dalam Optimalisasi Potensi dan /atau penyelesaian permasalahan Daerah
4. Penghargaan sebagai Kota Sangat Inovatif pada Indeks Inovasi daerah 2025
5. Mendapatkan predikat “Kota Sangat Inovatif” pada Kategori Kota dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tujuan 5.	Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana
------------------	--

Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 didukung dengan beberapa sasaran strategis. Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah di Kota Denpasar pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

14) Sasasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang baik dan andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa kontruksi yang berkualitas dan berkelanjutan, kondisi jalan yang baik di lingkungan Kota Denpasar, adanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi, drainase yang berfungsi normal, sistem sanitasi yang lancer dan terakses pada pengolahan limbah, rumah tangga yang mendapatkan akses air minum serta irigasi yang berfungsi normal.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 3.22

Tabel. 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR										
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	72.54	74.73	103.019	63.35	86.14	135.974	64.86	132.809
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :					135.974					

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian kualitas infrastruktur Denpasar Tahun 2024 yakni 74,73% sudah melampaui target dari 72,54%. Pada Tahun 2025, Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar yakni meningkat menjadi **86,14%** melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 63,35%. Target tahun 2025 lebih kecil dikarenakan adanya penambahan indikator /komponen dalam menentukan capaian kualitas infrastruktur denpasar. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur adalah **135,974% (Baik Sekali)**. Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD yakni sebesar 132,80%.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR								
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	60.47	72.54	63.35	72.54	74.73	86.14

Dari data diatas, Tahun 2023 sampai 2025 realisasi capaian kualitas infrastruktur melampaui target yang ditetapkan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 14 :MENINGKATKANNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR							
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	86.14	-	-	-	-

Beberapa indikator dalam penghitungan capaian kualitas infrastruktur yakni: Persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase jalan lingkungan kondisi baik, peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkotaan, persentase Panjang saluran drainase berfungsi normal, persentase rumah tangga terakses instalasi pengolahan air limbah, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum, dan persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal.

Kualitas jalan lingkungan yang baik dan mantap sangat diperlukan, mengingat Kota Denpasar menjadi Ibu Kota Provinsi Bali dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi serta mobilitas masyarakat ke Kota Denpasar tinggi. Masalah kemantapan jalan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemantapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga.

Adapun Analisis keberhasilan/kegagalan yang dialami adalah untuk indikator prosentase capaian kualitas infrastruktur, dimana ada 9 komponen yang mendukung secara menyeluruh telah meningkat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kualitas infrastruktur yakni dalam menjalankan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan, terbatasnya anggaran, kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kurangnya ketersediaan data base infrastruktur serta kemampuan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja PD merupakan tantangan permasalahan internal yang harus disikapi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur.

Solusi dan Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan mempercepat pencapaian kualitas infrastruktur yakni:

1. Meningkatkan layanan infrastruktur terutama pada sektor persampahan dan drainase karena nilainya masih paling rendah.
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan cara percepatas proses komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur
3. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas yang dikerjakan.
4. Meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
5. Melakukan survey dan merealisasikan usulan-usulan yang masuk ke DPUPR.

- 6. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan dan penganggaran.
- 7. Melakukan koordinasi dengan kecamatan serta desa/lurah.

Inovasi yang dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan capaian kualitas infrastruktur yakni meningkatkan layanan persampahan melalui peningkatan teknologi, sarana-prasarana dan partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk drainase melalui peningkatan sarpras untuk mengatasi permasalahan banjir.

15) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus sebagai berikut.

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Keterangan:

- IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA : Indeks Kualitas Air
- IKU : Indeks Kualitas Udara
- IKL : Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL di Kota Denpasar Tahun 2025 diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 72,41) + (0,405 \times 80,18) + (0,219 \times 43,96) \\ &= 27,23 + 32,47 + 9,63 \\ &= 69,33 \text{ (kategori sedang)} \end{aligned}$$

Nilai IKLH Tahun 2025 tersebut telah mengacu pada hasil perhitungan pada aplikasi dari KLHK RI, yaitu melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Dalam perhitungan nilai IKA pada aplikasi

tersebut, penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level kabupaten/kota proses inputnya dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar, sedangkan penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level pusat diinput langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI).

Dalam perhitungan nilai IKU dan IKL pada aplikasi, penginputan data dilakukan langsung oleh KLHK, dengan memasukkan nilai hasil pengujian passive sampler untuk perhitungan IKU dan data hasil analisis tutupan lahan berdasarkan citra satelit Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan berbagai sumber lainnya untuk perhitungan IKL. Berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi, maka diperoleh hasil perhitungan Kota Denpasar untuk tahun 2025 sebesar 72,41 untuk IKA; 80,18 untuk IKU; dan 43,96 untuk IKTL, sehingga total nilai IKLH diperoleh sebesar 69,33 dan termasuk dalam kriteria sedang yaitu berada pada rentang $60 < x \leq 85$.

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH Tahun 2025 yaitu sebesar 62,04, maka nilai capaian IKLH sebesar **69,33** tersebut sudah melampaui target dengan persentase realisasi sebesar 111,75%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisilingkungan hidup di Kota Denpasar masih berada pada tingkat yang cukup terkendali, namun telah menghadapi berbagai tekanan akibat aktivitas perkotaan, kepadatan penduduk, serta dinamika pembangunan dan pariwisata. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas media lingkungan, khususnya air, udara, dan lahan, yang memerlukan pengelolaan dan pengendalian secara berkelanjutan.

Nilai IKLH kategori Sedang mencerminkan perlunya penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup melalui peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta perlindungan dan peningkatan kualitas lahan perkotaan. Capaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan hidup agar kualitas lingkungan dapat ditingkatkan secara bertahap menuju kategori yang lebih baik pada periode perencanaan berikutnya.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 beserta target dan persentase realisasinya serta perbandingan dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.99	61.14	98.628	62.04	69.33	111.750	62.13	111.588
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :					111.750					

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH Tahun 2025 yaitu sebesar 62,04, maka nilai capaian IKLH sebesar **69,33** tersebut sudah melampaui target dengan persentase realisasi sebesar 111,75%. Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD sebesar 111,58%. Namun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari tahun ke tahun.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.95	61.99	62.04	58.78	61.14	69.33

Pencapaian target IKLH tahun 2025 secara numerik menunjukkan nilai di atas target, namun perubahan tata cara perhitungan IKLH pada tahun 2025 baik dari sisi parameter, sumber data, metode pengolahan data, maupun mekanisme pembobotan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan, baik dengan target yang tercantum dalam Renstra DLHK Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun dengan dengan nilai IKLH pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian nilai IKLH tahun 2025 dapat digunakan sebagai baseline evaluasi kinerja lingkungan hidup berdasarkan metode perhitungan terbaru, untuk tahun berikutnya.

Namun demikian jika dibandingkan dengan target IKLH Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang menyatakan nilai target IKLH Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 64,93

dengan simulasi target mengacu pada perhitungan yang baru sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, maka capaian IKLH Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 69,33 sudah melebihi target yang tertuang dalam surat keputusan tersebut.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69.33	77.26	78.76	89.73	88.03

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH nasional tahun 2025 sebesar 78,76 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 77,26 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 69,33 masih berada di bawah capaian nilai IKLH nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Adapun Analisis Keberhasilan/Kegagalan yang dilakukan adalah Adanya perubahan tata cara perhitungan menyebabkan hasil tidak dapat dievaluasi sebagai keberhasilan atau kegagalan secara kuantitatif. Oleh karena itu, capaian ini akan digunakan sebagai baseline evaluasi kinerja lingkungan hidup berdasarkan metode perhitungan terbaru.

Adapun solusi yang dilakukan yakni 1) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, 2) memperbanyak ruang terbuka hijau. 3) meningkatkan keterlibatan OPD terkait dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. 4) melaksanakan dan memaksimalkan penanaman pohon.

Adapun penjabaran mengenai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi KLHK RI yaitu dengan menginput data hasil uji kualitas air di Kota Denpasar Tahun 2025 pada website <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/>. Adapun pengujian kualitas air sungai

tahun 2025 yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikerjasamakan dengan pihak yaitu Laboratorium yang terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK. Data hasil uji kualitas air yang diinput dalam sistem merupakan hasil pengujian terhadap 30 (tiga puluh) titik lokasi pada 10 (sepuluh sungai/tukad) untuk dua kali periode pengambilan, yaitu pada bulan Maret 2025 dan Juli 2025 sehingga jumlah titik sampel untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 60 (enam puluh) titik sampel. Adapun lokasi dan titik sampel air sungai di Kota Denpasar Tahun 2025

Tabel 1
Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
1.	Tukad Badung	Hulu	Dam Mertegangga (Desa Ubung Kaja)
		Tengah	Jalan Pulau Biak Denpasar
		Hilir	Estuari Dam, Pemogan (dekat Pura Tanah Kilap)
2.	Tukad Ayung	Hulu	Jl. Dam Peraupan, Peguyangan Kaja (Belakang SMAN 8 Dps)
		Tengah	Jl. Noja Saraswati, Oongan
		Hilir	Jembatan By Pass Kesiman Kertelangu (Dekat Restoran Hongkong Garden)
3.	Tukad Teba	Hulu	Jl. Gatsu Barat Kel. Ubung (Belakang Hotel Aston)
		Tengah	Jl. Batukaru (Br. Monang Maning Ds. Tegal Kerta)
		Hilir	Imam Bonjol (Ds. Pemecutan Kelod)
4.	Tukad Mati	Hulu	Jl. Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja
		Tengah	Br. Monang maning Ds. Tegal Harum (Jl. Mahendradatta)
		Hilir	Br. Umadui Ds. Padangsambian Kelod
5.	Tukad Loloan	Hulu	Jl. Hangtuah, Sanur (Timur Bundaran Renon)
		Tengah	Jl. Penyaringan, Sanur
		Hilir	Jl. Tanjung, Sanur
6.	Tukad Rangda	Hulu	Jl. Tukad Irawadi, Kelurahan Panjer
		Tengah	Jl. Tukad Badung XX, Gang I (DAM)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel SeseTan (dekat jembatan)
7.	Tukad Punggawa	Hulu	Jl. Ir. H. Juanda, Renon (dekat Bajra Sandhi)
		Tengah	Jl. Tukad Yeh Aya, Kel. Renon (dekat Moena Fresh)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. SEsetan (depan titilestari)
8.	Tukad Ngenjung	Hulu	Jl. Tukad Balian Gg. IX
		Tengah	Jl. Tukad Balian (depan Gg. Nanggala)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. SeseTan (depan Pura)
9.	Tukad Bindu	Hulu	Jl. Gatsu Timur Kel. Tonja
		Tengah	Jl. Surabi
		Hilir	Jl. Sedap Malam
10.	Tukad Telanga	Hulu	Jl. Tunjung Tuter, Br. Saih, desa Peguyangan Kaja
		Tengah	Jl. Lembusora, Br. Pemalukan Kel. Peguyangan
		Hilir	Jl. Ken Arok Br. Binoh Kelod, Desa Ubung Kaja

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi KLHK RI, diperoleh total nilai indeks kualitas air Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 72,41. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $60 < x < 85$. Berdasarkan kondisi demikian perlu dilakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menggalakkan upaya pengendalian pencemaran air, salah satunya melalui Program Kali Bersih (Prokasih) dengan tidak membuang sampah serta limbah hasil industri maupun rumah tangga yang tidak diolah ke sungai.



Berdasarkan Gambar diatas, diketahui bahwa secara numerik Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2025 lebih tiinggi dibandingkan tahun 2024 namun karena adanya perubahan tata cara perhitungan IKA pada tahun 2025 dari sisi metode pengolahan data dan mekanisme pembobotan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan. Namun jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang menyatakan nilai target IKA Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 65,68 dengan simulasi target mengacu pada perhitungan yang baru sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, maka capaian IKA Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 72,41 sudah melebihi target yang tertuang dalam surat keputusan tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian IKA nasional tahun 2025 sebesar 72,97 dan capaian IKA Provinsi Bali sebesar 76,65 maka nilai IKA Kota Denpasar

Tahun 2025 sebesar 72,41 masih berada di bawah capaian nilai IKA nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengendalian pencemaran air melalui pencegahan pencemaran air dan penanggulangan pencemaran air di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode *passive sampler*. Pengukuran dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Pasar Badung, Jalan Gajah Mada), area industry (Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung), serta area perkantoran/perdagangan (Kantor DLHK Kota Denpasar, Jalan Majapahit). Lokasi pemasangan alat *passive sampler* telah ditentukan serta alat dan bahan dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun pemasangan *passive sampler* dilaksanakan sebanyak dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025. Data titik lokasi sampel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3
Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara

No	Nama Jalan	Lokasi Sampel	Metode Pemantauan	Koordinat	
				Lattitude	Longtitude
1	Jl. Gajah Mada	Transportasi	Manual Passive	-8.6558286	115.2128046
2	Jl. Hang Tuah Sanur	Industri/ Agro Industri	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
3	Jl. Gunung Galunggung	Pemukiman	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
4	Jl. Majapahit, No.6	Perkantoran/ Komersial	Manual Passive	-8.637113	115.211341

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2024

Tabel 4
Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025

Parameter	Hasil pemantauan	Baku mutu	Indeks Dibagi Baku Mutu
N02	9,17	50	0,18
S02	7,73	45	0,17
PM2.5	12,78	15	0,85
Rataan Indeks			0,40
Indeks Kualitas Udara			80,18

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 80,18. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria baik, dengan rentang nilai skor $60 < x \leq 85$.

Indeks Kualitas Lahan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas lahan adalah indeks kualitas lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini yaitu:

$$IKTL = 100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 43,96. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 43,96. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $0 < x \leq 60$.

Program dan Kegiatan :

Berikut nama-nama program APBD 2025 yang mendukung pencapaian IKLH:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Permasalahan/ kendala

Adapun permasalahan hambatan yang ditemukan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas lahan di Kota Denpasar tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akibat perkembangan perkotaan
2. Adanya pemotongan/penebangan pohon perindang di beberapa ruas jalan akibat pembangunan trotoar
3. Kurangnya peremajaan pohon perindang di ruas-ruas jalan.
4. Terbatasnya tenaga dan sarana seperti mobil tangga dan mobil angkut pada saat melakukan perawatan pohon perindang.
5. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan pohon baik secara mandiri maupun melalui pengajuan permohonan penebangan pohon.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
2. Melakukan penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH.
3. Melakukan penambahan personil dan peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian tutupan lahan
4. Menyusun kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.

5. Meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan.
7. Melakukan pengembangan ekowisata, taman kehati dan kampung hijau dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya sehingga keberlanjutannya dapat terjaga.
8. Melakukan penanaman pohon perindang di beberapa ruas jalan dengan memilih pohon yang memiliki akar tunggal sehingga nantinya tidak menyebabkan kerusakan trotoar atau badan jalan. Selain itu juga akan dilakukan penempatan buis-buis untuk menjaga akar pohon agar tidak menyebar ke badan jalan.
9. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan kerja DLHK Kota Denpasar dalam melakukan perawatan pohon perindang.
10. Melakukan pengawasan dan memperketat pengajuan pohon pengganti oleh pemohon yang mengajukan permohonan penebangan pohon sesuai Peraturan Walikota Denpasar No. 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang.

Inovasi

Untuk meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumbernya maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengembangkan suatu inovasi yang dikenal dengan nama “Vasudhaiva Kutumbakam menuju Denpasar Bersih Selasa Jumat Anorganik (Denpasar Bersalju)”. Inovasi tersebut merupakan Gerakan Bersama pengelolaan sampah dengan berlandaskan spirit kebersamaan dan semangat gotong royong sehingga nantinya diharapkan semakin banyak masyarakat yang aktif dalam mengelola sampah yang dihasilkan mulai dari memilah, mengolah, menabung sampah, dan membuang sampah yang sudah terpilah sesuai jadwal pembuangan sampah yaitu Selasa dan Jumat untuk sampah anorganik dan hari lainnya (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu) untuk sampah organik. Selain untuk mengurangi beban operasional di TPS 3R dan TPST, hal tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mewujudkan circular economy di Kota Denpasar.

Foto Kegiatan



Gambar 3.14 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan



Gambar 3.25 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah

Penghargaan

Adapun penghargaan/ prestasi yang diraih Kota Denpasar terkait pengelolaan lingkungan hidup selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Penghargaan Adiwiyata

Tahun 2025 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Provinsi sebanyak 1 sekolah yaitu SDN 23 Dangin Puri, Adiwiyata Nasional sebanyak 2 sekolah yaitu SDN 5 Sumerta dan SMP PGRI 3 Denpasar, dan Adiwiyata Mandiri sebanyak 1 sekolah yaitu SD Hainan School. Penghargaan Adiwiyata Nasional diserahkan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P di Gedung Sasono Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis, 11 Desember 2025.

2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam)

Untuk tahun 2025, Kota Denpasar telah mendapatkan penghargaan Thropy Program Kampung Iklim (Proklam) Utama pada tingkat nasional yang diraih oleh Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Penerimaan Penghargaan Proklam 2025 oleh KLH/BPLH RI dilaksanakan pada 1 Desember 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri LH, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq.

16) Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Pada tingkat nasional, penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu Culture for Development Indicators (CDIS). Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan, dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Dalam hal ini, IPK bukan mengukur nilai budaya tetapi lebih memotret capaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Berkenaan dengan penghitungan Indeks Kebudayaan Kota Denpasar, pada saat ini terdapat 3 (tiga) model penghitungan, yaitu penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional (Handbook IPK, 2018), penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bali dan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar.

Penyusunan IPK Kota Denpasar perlu dilakukan untuk mengukur pembangunan kebudayaan yang berlangsung di Kota Denpasar. Tidak tersedianya data yang sama seperti yang dipergunakan untuk menyusun IPK Nasional menjadi kendala utama dalam penyusunan IPK Kota Denpasar, sesuai dengan pedoman dan arahan penyusunan IPK Nasional. Penyusunan IPK secara nasional dilakukan pada tahun 2018 adalah dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP dan Susenas KOR 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga.

Pada saat ini, data yang sesuai dengan pedoman penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut, tidak tersedia di Kota Denpasar. Untuk dapat menyusun IPK Kota Denpasar, maka dibuat pengukuran dengan data yang tersedia, dengan tetap mengacu dari IPK nasional dan indikator penjabaran misi RPJMD Provinsi Bali. Dari tiga model tersebut, atas dasar pertimbangan sifatnya yang temporer serta ketersediaan data, maka metode yang paling mungkin untuk dipilih (feasible) adalah yang ketiga atau Penyusunan IPK Kota Denpasar berbasis data yang tersedia. Oleh sebab itu, apapun hasilnya pada saat ini, masih akan dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan ketersediaan data yang ada.

Sangat disadari, karena IPK ini disusun berdasar data yang tersedia tentang kondisi spesifik Kota Denpasar, maka IPK ini tidak dapat diperbandingkan/disamakan dengan IPK daerah lain. Namun demikian, IPK yang Penghitungan IPK Kota Denpasar 15 disusun ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di bidang kebudayaan Kota Denpasar, antar waktu, selama indikator yang dipergunakan datanya tersedia secara continuous atau time series.

Model Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar diadopsi dari UNESCO Culture for Development Indicators (CDIS) dengan menempatkan 'kebudayaan' sebagai salah satu indikator untuk mendukung pencapaian misi 5 RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Meskipun IPK Kota Denpasar yang disusun hanya berlaku bagi Kota Denpasar, namun tetap mengacu pada IPK Nasional.

Sesuai dengan pedoman yang ada dalam perhitungan IPK Nasional, metode yang digunakan dalam menghitung IPK Kota Denpasar, terdiri dari 5 (lima) tahap:

1. Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK

Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan indikator yang dinilai relevan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan di Kota Denpasar. Indikator yang dipilih berdasarkan ketersediaan data dan yang dijadikan sebagai alat ukur oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan IPK Kota Denpasar tidak digunakan indikator yang sama dengan indikator IPK Nasional yang menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP dan Susenas KOR 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga dan dilakukan pengumpulan datanya melalui survei. Dalam penyusunan IPK Kota Denpasar, karena keterbatasan waktu dan biaya saat pengumpulan Penghitungan IPK Kota Denpasar 16 data, tidak dilakukan melalui survei rumah tangga. Untuk itu, digunakan data yang tersedia pada perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi kebudayaan.

2. Proses Seleksi Indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator mana saja yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Pemetaan dan proses seleksi indikator terhadap penyusunan IPK dilakukan dengan mengkaji ulang semua indikator yang dikumpulkan, selanjutnya dipilih indikator yang sesuai dengan 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional, yakni: (1)

dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Data-data ini kemudian diseleksi untuk dilihat keterkaitannya dengan 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional. Pertimbangan dalam proses seleksi ini dilakukan melalui proses diskusi oleh para ahli atau expert judgment, yaitu suatu penilaian berdasarkan seperangkat kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam suatu disiplin atau bidang pengetahuan tertentu.

3. Indikator Hasil Seleksi

Melalui proses seleksi terhadap data-data yang ada, diperoleh sejumlah data yang mencerminkan indikator dari 7 (tujuh) dimensi IPK Nasional. Dalam proses ini diperoleh 23 (dua puluh tiga) indikator terpilih. Indikator terpilih ini akan digunakan untuk menentukan skor masing-masing dimensi IPK.

4. Normalisasi Indikator

Setelah melalui proses seleksi dan diperoleh 23 (dua puluh tiga) indikator terpilih, data-data ini masih bervariasi satuannya sehingga perlu Penghitungan IPK Kota Denpasar 17 dilakukan proses pengolahan lebih lanjut, yaitu normalisasi data. Tujuan normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama sebagai standarisasi. Pada tahap pertama dilakukan validasi data terlebih dahulu, kemudian dilakukan penghitungan rata-rata. Normalisasi data dilakukan melalui pemberian skor, dengan tujuan untuk menyamakan ukuran data. Dengan memperbandingkan data dengan rata-ratanya maka dapat dibuat skor secara gradual sebagai berikut: - skor 1 jika lebih kecil dari rata-rata; - skor 3 jika besarnya sama dengan rata-rata; - skor 5 jika lebih besar dari rata-rata. (nilai skor ini berlaku untuk indikator yang baik/positif; untuk indikator yang negatif seperti konflik sosial, maka skor ini berlaku sebaliknya).

5. Penentuan Bobot Tiap Dimensi

Penentuan bobot bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan secara relatif terhadap dimensi lain. Pertimbangan dalam proses penentuan bobot ini dilakukan melalui proses diskusi oleh para ahli atau expert judgment, yaitu suatu penilaian berdasarkan seperangkat kriteria dan/atau keahlian tertentu yang telah diperoleh dalam suatu disiplin atau bidang pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para ahli tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. Penilaian para pakar adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan

tinjauan secara cepat berdasarkan pengetahuan para pakar terkait suatu aspek tertentu dalam mengukur indeks.

Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024			CAPAIAN TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN										
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	68.54	70.01	102.144	74.84	80.78	107.936	74.84	107.936
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :					107.936					

Penghitungan IPK Kota Denpasar dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap setiap indikator pembentuk IPK.

- Membuat nilai rata-rata capaian time series selama 5 tahun (2016-2020) atau sesuai data yang tersedia, dirata-rata dan dianggap sama dengan rata-rata 5 tahun.
- Hasil pemberian skor masing-masing indikator setiap tahun kemudian dijumlah. Jumlah skor indikator pada tahun 2018 digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan skor IPK Kota Denpasar.
- Oleh karena IPK Nasional untuk Provinsi Bali yang tersedia adalah IPK tahun 2018, maka IPK ini digunakan sebagai angka acuan/dasar perhitungan. Kemudian untuk konversi target yang direncanakan menggunakan formula sebagai berikut:

$$IPK \text{ Kota Denpasar} = \frac{\text{Total skor target Kota Denpasar tahun } t}{\text{Total skor Kota Denpasar tahun 2018} *} \times IPK \text{ Bali tahun 2018}$$

**) Total skor Kota Denpasar tahun 2018 = IPK Denpasar 2018 = IPK Bali 2018*

Berdasarkan hasil pendataan ulang pada tahun 2024, terdapat banyak indikator IPK Kota Denpasar yang mengalami penyesuaian, termasuk updating data dari dinas terkait. Hasil perhitungan IPK Kota Denpasar pada saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan menggunakan data yang tersedia saat itu sebagai berikut:

- IPK Kota Denpasar tahun 2018 berdasarkan hasil konversi skor indikator tahun 2018 adalah sama dengan IPK Provinsi Bali = 65,39, sementara IPK Kota Denpasar tahun 2019 dan 2020 masing-masing 63,85 dan 54,62.

IPK	Realisasi <i>(berdasarkan data saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026)</i>		
	2018	2019	2020
IPK Kota Denpasar (waktu penyusunan RPJMD)	65,39	63,85	54,62

Terjadi penurunan IPK tahun 2020 dan 2021 disebabkan beberapa indikator menurun capaiannya akibat pandemi covid-19, seperti pembatasan pertunjukan seni budaya serta beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

- Target IPK Kota Denpasar yang tercantum dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 berdasarkan data yang tersedia saat itu dan hasil penghitungan IPK tahun 2023-2026 sebagai berikut:

IPK	Target <i>(berdasarkan data saat penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026)</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
IPK Kota Denpasar (waktu penyusunan RPJMD)	66,97	68,54	68,54	74,84	74,84

Sementara itu, berdasarkan updating data indikator IPK Kota Denpasar yang dilakukan pada tahun 2025, terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan data serta satuan indikator. Hal ini dikarenakan perangkat daerah mengalami kesulitan dalam mengukur serta mengumpulkan data tersebut, sehingga perlu direkap ulang dan dilakukan penghitungan kembali. Berikut hasil penghitungan IPK Kota Denpasar berdasarkan updating data tahun 2025:

- Skor IPK Kota Denpasar pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari Tahun 2024 dan telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari data indikator pada dimensi ekspresi budaya yaitu Jumlah Pelaku Seni yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dan indikator pada dimensi ketahanan sosial budaya, yaitu Jumlah Kejadian Konflik Sosial yang mengalami kenaikan kejadian.
- Jika dilihat dari target IPK Kota Denpasar tahun 2025, hasil hitungan saat penyusunan RPJMD Kota Denpasar menunjukkan angka 74,84, sementara berdasarkan hasil realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan angka **80,78**.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN 16 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN								
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	68.54	68.54	74.84	68.47	70.01	80.78

Dari data diatas, Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, namun Tahun 2024 dan 2025 Indeks Pembangunan Kebudayaan melampaui target yang ditetapkan. Capaian rata-rata kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 sebesar 107,93 persen (Baik Sekali). Sedangkan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD sebesar 107,93 persen (Baik Sekali).

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2025	STANDAR PROVINSI (2025)	STANDAR NASIONAL (2025)	% CAPAIAN DENGAN PROVINSI	% CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 15 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	80.78	71.36	57.13	113,20	141,39

Dari tabel diatas, Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 melampaui Provinsi Bali, namun melampaui capaian nasional.

Faktor yang mempengaruhi Penyusunan IPK Kota Denpasar

Optimalisasi upaya pelestarian kebudayaan (pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) dapat dilaksanakan dengan memetakan potensi masalah serta mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran IPK Kota Denpasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut antara lain adalah:

- Indikator IPK Kota Denpasar tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026, untuk mewujudkan misi kelima, sehingga harus dilaksanakan;
- Kejadian luar biasa pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke sistem online (daring);
- Adanya kebijakan dalam hal prioritas pendanaan saat pandemi, sehingga penyelenggaraan festival, lomba seni-tradisi dan fasilitasi seni budaya yaitu tetap dilaksanakan (luring) dengan menerapkan protokol kesehatan maupun secara daring, untuk menunjukan potensi objek kebudayaan

sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat. Selain itu juga terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat;

- Selain faktor di atas, dalam hal ketersediaan data dukung IPK Kota Denpasar, belum seluruh potensi budaya yang ada terdata dengan rapi secara kontinu agar lebih valid. Saat ini, data pendukung IPK Kota Denpasar dianggap kurang penting sehingga data yang tersedia tidak berkelanjutan (continuous);
- Perlu ada ada pendataan ulang untuk indikator yang belum tersedia lengkap datanya sehingga menjadi lebih valid

Rekomendasi ke depan mengenai penyusunan indeks kebudayaan ini ada beberapa pilihan/alternatif:

- 1) Tetap seperti sekarang, dengan cara melanjutkan metode yang dilakukan saat ini dan pemutakhiran data secara rutin; atau
- 2) Mempertajam penghitungan IPK dengan perubahan, dalam hal ini akan menjadi kuat alasannya sejalan dengan beberapa momentum perubahan ke depan pada tahun 2025 sebagai waktu integrasi sistem pemerintahan dan perencanaan yang terpadu (Pilkada/pelantikan kepala daerah serentak, tahun mulai yang sama untuk RPJP, RPJM, RKP dan turunannya). Adapun perubahan yang dilakukan dengan cara:
 - Mengikuti dan menyesuaikan dengan variabel nasional, dengan melakukan penambahan kegiatan pendataan yang memadai, atau
 - Memperkuat dimensi lokal dengan merumuskan variabel pengukuran yang diturunkan dari Peraturan Daerah secara lokal dan penambahan kegiatan pendataan secara memadai.

Solusi yang dilakukan agar IPK Kota Denpasar mencapai target dan meningkat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemahaman terhadap seni budaya di lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.
2. Pembinaan kesenian dan kebudayaan di tiap banjar di Kota Denpasar
3. Pemberian insentif bagi kelompok-kelompok kesenian untuk terus mengembangkan seni budaya
4. Membuat lomba-lomba kesenian untuk segala kelompok umur sehingga meningkatkan cinta seni budaya dari sejak dini.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan pagu sebesar Rp 1.678.158.827.573,00 dan realisasi belanja atas pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.372.326.767.686,50 dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	444,243,505,696.00	423,127,572,079.50	95,246
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	4,031,600,820.00	3,589,839,050.00	89,042
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat	20,280,608,334.00	19,483,742,159.00	96,070
4	Mengurangi Kemiskinan	16,661,133,500.00	16,253,114,252.00	97,551
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA	959,557,000.00	908,558,737.00	94,685
6	Menurunnya kasus kriminalitas	2,019,617,500.00	1,393,492,908.00	68,997
7	Meningkatkan ketahanan pangan	10,950,808,527.00	10,170,259,850.00	92,872
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	18,829,109,700.00	17,047,908,206.00	90,540
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9,160,856,500.00	8,224,145,294.00	89,774
10		100,272,682,690.00	74,082,545,104.00	73,878

SASARAN STRATEGIS		RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			
11	Mengurangi Pengangguran	3,429,086,800.00	3,317,264,931.00	96,739
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	5,347,856,400.00	4,077,135,874.00	76,238
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	943,543,500.00	891,264,216.00	94,459
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	820,282,467,906.00	616,235,347,558.00	75,124
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	148,608,230,600.00	103,786,584,930.00	69,839
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	72,134,162,100.00	69,737,992,538.00	96,678
TOTAL		1,678,158,827,573.00	1,372,326,767,686.50	81.775

Sumber : BAPPEDA dan BPKAD Kota Denpasar 2025 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.26 diatas dapat diketahui persentase realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 81,775%. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2025 sebagaimana Tabel dibawah.

Tabel 3.26 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
MISI 1					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	99,744	95,246	4,498
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	100,421	89,042	11,379

3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	97,944	96,070	1,874
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,903	97,551	2,352
MISI 2					
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,788	94,685	6,103
6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	98,228	68,997	29,231
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	87.281	92.872	-5.591
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	1	99,853	90,540	9,313
MISI 3					
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,544	89,774	10,770
10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	99,125	73,878	25,247
MISI 4					
11	Mengurangi Pengangguran	1	100,328	96,739	3,589
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	107	76,238	30,762
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	100	94,459	5,541
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	135,974	75,124	60,850
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	111,750	69,839	41,911
MISI 5					
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	107,936	96,678	11,258

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2025 (Data diolah)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam Tabel 3.27 terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 16 (enam belas) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% dengan Tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan

bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	99,744	95,246	4,498
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	100,421	89,042	11,379
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	97,944	96,070	1,874
4	Mengurangi Kemiskinan	1	99,903	97,551	2,352
5	Meningkatkan Upaya Penanganan Pelanggaran PERDA	1	100,788	94,685	6,103
6	Menurunnya Kasus Kriminalitas	1	98,228	68,997	29,231
7	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1	87.281	92.872	-5.591
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Upaya Penanganan Bencana	1	99,853	90,540	9,313
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,544	89,774	10,770
10	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	99,125	73,878	25,247
11	Mengurangi Pengangguran	1	100,328	96,739	3,589
12	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi	1	107	76,238	30,762
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	100	94,459	5,541
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	135,974	75,124	60,850
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	111,750	69,839	41,911
16	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	107,936	96,678	11,258

Berdasarkan Tabel 3.27, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran menuju tingkat efisiensi namun belum maksimal dan telah terdapat beberapa efisiensi.

1. Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan tercapainya capaian kinerja 99,774 persen dicapai dengan realisasi anggaran 95,246 persen.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan tercapainya capaian kinerja 100,421 persen dicapai dengan realisasi anggaran 89,042 persen.
3. Sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dengan tercapainya capaian kinerja 97,944 persen dicapai dengan realisasi anggaran 96,070 persen.
4. Sasaran mengurangi kemiskinan dengan tercapainya capaian kinerja 99,903 persen dicapai dengan realisasi anggaran 97,551 persen.
5. Sasaran meningkatnya upaya penanganan pelanggaran PERDA dengan tercapainya capaian kinerja 100,788 persen dicapai dengan realisasi anggaran 94,685 persen.
6. Sasaran menurunnya kasus kriminalitas dengan tercapainya capaian kinerja 98,228 persen dicapai dengan realisasi anggaran 68,997 persen.
7. Sasaran meningkatnya ketahanan pangan dengan tercapainya capaian kinerja 87,281 persen dicapai dengan realisasi anggaran 92,872 persen.
8. Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana dengan tercapainya capaian kinerja 99,853 persen dicapai dengan realisasi anggaran 90,540 persen.
9. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan tercapainya capaian kinerja 100,544 persen dicapai dengan realisasi anggaran 89,774 persen.
10. Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan tercapainya capaian kinerja 99,125 persen dicapai dengan realisasi anggaran 73,878 persen.
11. Sasaran mengurangi pengangguran dengan tercapainya capaian kinerja 100,328 persen dicapai dengan realisasi anggaran 96,739 persen.
12. Sasaran optimalnya pemanfaatan teknologi dengan tercapainya capaian kinerja 107 persen dicapai dengan realisasi anggaran 76,238 persen.
13. Sasaran meningkatnya inovasi daerah dengan tercapainya capaian kinerja 100 persen dicapai dengan realisasi anggaran 94,459 persen.
14. Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dengan tercapainya capaian kinerja 135,974 persen dicapai dengan realisasi anggaran 75,124 persen.

15. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tercapainya capaian kinerja 111,750 persen dicapai dengan realisasi anggaran 69,839 persen.
16. Sasaran meningkatnya pembangunan kebudayaan dengan tercapainya capaian kinerja 107,936 persen dicapai dengan realisasi anggaran 96,678 persen.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Atas Data Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025. LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, sebagai berikut:

- 10 indikator atau 59% kategori Baik Sekali dan melampaui target;
- 6 indikator atau 35% kategori Baik;
- 1 indikator atau 6% kategori Baik (Data masih menggunakan tahun 2024, dikarenakan belum rilis BPS);

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja Tahun Pertama yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator dengan capaian kinerja Baik Sekali karena melampaui target, 6 (enam) Indikator dengan capaian kinerja Baik, 1 (satu) Indikator dengan capaian kinerja Baik namun masih memakai data tahun 2024 karena data 2025 belum rilis dari BPS. Terhadap target kinerja yang masih dalam kategori Baik, telah dilakukan analisis permasalahannya serta solusi perbaikannya sebagaimana tercantum pada analisis capaian masing-masing indikator kinerja.

Denpasar, 27 Maret 2026

	Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh: WALIKOTA DENPASAR I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
---	---



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Denpasar, 2 Januari 2025
WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025
1		2		3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,783
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,84
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	Rupiah	2.703.535
4	Mengurangi kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	1,97
5	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	5	Persentase penegakan PERDA	Persen	93,85
6	Menurunnya kasus kriminalitas	6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	Angka	105,43
7	Meningkatkan ketahanan pangan	7	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	96
8	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	90,10
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9	Rata-Rata SKM	Persen	91,79
10	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	Predikat SAKIP	Predikat	(BB) 78,35
		11	Opini BPK	Opini	WTP
11	Mengurangi pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,10

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025
1		2		3	4
12	Optimalnya pemanfaatan teknologi	13	Indeks SPBE	Indeks	4,00
13	Meningkatnya inovasi daerah	14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Persen	63,35
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,04
16	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	Indeks	74,84

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp 3.590.924.704.365,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

**PENGHARGAAN DIRAIH PEMKOT DENPASAR
2025**

NO	BULAN	NAMA PENGHARGAAN	DARI	KETERANGAN	OPD
1	JANUARI (9/1)	Penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi	BPK RI	Desa Tegal Harum, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, Membentuk tim pengawas desa yang independen, Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.	Desa Tegal Harum
2	MARET (5/3)	Indek Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 Tingkat Nasional katagori pemerintah kota.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Pemerintah Kota Denpasar memiliki Komitmen dalam pencegahan Korupsi	Inspektorat
3	MARET (5/3)	Terbaik Ketiga Capaian Rata-Rata IPKD MCP 2018-2024	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Pemerintah Kota Denpasar memiliki Komitmen dalam pencegahan Korupsi	Inspektorat
4	APRIL (25/4)	Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kinerja Tinggi	Kementerian Dalam Negeri	Penghargaan ini diberikan atas prestasi Kota Denpasar yang menjadi terbaik kedua nasional tingkat kota sebagai Daerah Peraih Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,7751 dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024.	Bagian Tapem
	APRIL (30/4)	Penghargaan Terbaik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	Pemerintah Kota Denpasar kembali sukses meningkatkan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Tahun 2025 dan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.	Bagian Organisasi
	MEI (23/5)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Kota Denpasar telah berhasil menjadi yang terbaik untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kinerja Terbaik Regional Bali/Nusra Kategori Kabupaten/Kota	Bagian Tapem
	JUNI (9/6)	Penghargaan WTP	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Kota Denpasar berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	BPKAD

				untuk yang ketiga belas kalinya. Keberhasilan ini diumumkan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Denpasar Tahun 2024 oleh BPK RI Perwakilan Bali	
5	JUNI (30/6)	Penghargaan Pelopor Umah Restorative Justice di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kejati Bali	Pemerintah Kota Denpasar di bawah kepemimpinan pasangan Walikota IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa berhasil menjadi Pelopor Umah Restorative Justice di Tingkat Desa dan Kelurahan	HUKUM
6	AGUSTUS (8/8)	Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Kota Denpasar terus konsisten menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.	DP3AP2KB
7	AGUSTUS (23/8)	Penghargaan Kejar Award 2025	Menko Perekonomian Airlangga Hartanto	Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Pendidikan mampu mengimplementasi Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar)	Disdikpora
8	OKTOBER (13/10)	Penghargaan Indonesia Prosperity City (Kota Sejahtera Indonesia)	DPD RI dalam Acara Indonesia Tourism Meeting Week (ITMW)	Penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam Kota sejahtera.	Dinas Pariwisata
9	OKTOBER (13/10)	Penghargaan Indonesian Green City (Kota Hijau Indonesia)	DPD RI dalam Acara Indonesia Tourism Meeting Week (ITMW)	Penghargaan ini sebagai komitmen kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan pariwisata tetap menjaga kota Denpasar yang hijau	Dinas Pariwisata
10	OKTOBER (13/10)	Penghargaan Indonesia Peace and Cultural Harmony City (Kota Perdamaian dan Harmoni Budaya Indonesia)	DPD RI dalam Acara Indonesia Tourism Meeting Week (ITMW)	Penghargaan diberikan pada Pemerintah Kota Denpasar karena salah satu kota yang mampu mewujudkan Kota Perdamaian dan Harmoni Budaya Indonesia	Dinas Pariwisata
11	OKTOBER (14/10)	Paritrana Award 2025	Pemprov Bali	Penghargaan bergengsi yang diberikan atas komitmen dan kepedulian dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Pemerintah Kota Denpasar.	Dinsos (Prokopim)
12	OKTOBER (16/10)	Mandaya Awards 2025	Kementerian Koordinator	Pemerintah Kota Denpasar erhasil menghadirkan praktik pemberdayaan masyarakat secara inovatif dan berkelanjutan	DPMD

			Pemberdayaan Masyarakat		
13	OKTOBER (21/10)	Penghargaan Pasar Pangan Aman	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penghargaan ini diberikan Pasar Kertha Waringin Sari, Kota Denpasar, hasil binaan Pemkot Denpasar melalui Dinas Perindag.	Disperindag
14	OKTOBER (22/10)	Peringkat 1 Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH)	Kementerian Hukum RI	Pemerintah Kota Denpasar mampu memberikan layanan terbaik dan transparan terkait dokumentasi hukum.	Hukum
15	NOPEMBER (10/11)	Penghargaan Anugerah Cita Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Penghargaan Anugerah Cita Negeri Kompas TV Tahun 2025 untuk kategori Cita Damai dan Inklusi merupakan wujud apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu mewujudkan iklim toleransi, kedamaian serta pembangunan daerah secara inklusi.	
16	NOPEMBER (25/11)	Penghargaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Lembaga Administrasi Negara (LAN)RI	Ini bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperbaiki penyusunan kebijakan, termasuk peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali).	Hukum
17	DESEMBER (1/12)	Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025	Menteri Dalam Negeri	Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri RI bekerja sama dengan Tempo Media Group kepada pemerintah daerah termasuk Pemkot Denpasar yang dinilai mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.	
		Penghargaan Kota Terinovativ	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 kali ini Kota Denpasar masuk dalam kategori Kota Sangat Inovatif yang diberikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.	
18	Januari (27/1/2026)	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2026	BPJS Kesehatan	Pemerintah Kota Denpasar berhasil dalam memastikan akses pelayanan kesehatan masyarakat sama rata dan tanpa ada hambatan biaya.	Dinkes
19		Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministras	Ombudsman RI	Pemerintah Kota Denpasar kembali sukses mendulang prestasi di awal Tahun 2026 Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia.	

20	Februari (11/2/2026)	Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Zona Integritas WBK dan WBBM tahun 2025	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)	Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan zona integritas wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025	OPD Pembina: 1) Bag Organisasi 2) Inspektorat OPD Peraih WBBM 2025: 1) Badan Pendapatan Daerah OPD Peraih WBK 2025: 1) Disdukcapil 2) Dinsos 3) BKPSDM 4) Kecamatan Denpasar Selatan
----	-------------------------	--	---	--	---



den

pasar

the heart of bali